



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023



PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

TIM PENULIS:

Pengarah : NAULI HANDAYANI, SKM,MSi
Penanggung Jawab : Dra.YUSNIMAR
Penyusun buku : NINI RAHMI, SKM, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023”. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan. Selain itu, data terpilah pada buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan perencanaan, kebijakan dan program dalam upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kekurangan tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak / Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bukittinggi yang telah

memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.

2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisiNya.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2023
Kepala Dinas P3APPKB
Kota Bukittinggi



NAULI HANDAYANI, SKM, M.Si
NIP .198101272003122009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Kegunaan Buku profile Gender dan Anak	7
E. Sumber Data	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Letak Geografis	12
B. Batas Administrasi Wilayah	12
C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi.....	15
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN	16
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	16
B. Penduduk Produktif / Beban Ketergantungan	18
C. Penyebaran Penduduk	21
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP	22
E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak	23
F. Laju Pertumbuhan Penduduk	25
G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	26
H. Kepala Keluarga Perempuan	27
BAB IV KONSTRUKSI GENDER	30
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	31
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	34
C. Keterwakilan Perempuan di Parlemen.....	35
D. Perempuan sebagai tenaga profesional	37
E. Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	37
BAB V GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN	40
A. Angka Partisipasi sekolah.....	41
B. Angka Partisipasi Kasar.....	43
C. Angka Partisipasi Murni	44
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	45
E. Rata-rata Lama sekolah	47
F. Tingkat Pendidikan	48
BAB VI. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	52
A. Angka harapan Hidup	52

B.	Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)	54
1.	Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan.....	55
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (<i>Antenatal Care</i>)...	56
3.	Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil.....	58
4.	Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	61
C.	Angka Kematian Bayi (AKB).....	62
1.	Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)	63
2.	Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	65
3.	Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan	66
4.	Status Gizi pada Balita	67
D.	Posyandu	70
E.	Penderita HIV / AIDS.....	71
F.	Keluarga Berencana	72
G.	Usia Perkawinan Pertama	75
H.	ASFR dan TFR.....	76
 BAB VII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN		 78
A.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78
B.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	80
C.	Status Pekerjaan	81
D.	Jumlah Jam Kerja	84
E.	Kemiskinan	85
F.	Lapangan Usaha	86
G.	Usaha Mikro dan Kecil (UKM).....	89
H.	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	90
I.	Koperasi.....	91
J.	Pekerja pada Instansi Pemerintah / Non Pemerintah.....	93
 BAB VIII BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN		 96
A.	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	97
B.	Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	100
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	100
2.	Perempuan Menduduki Jabatan Eselon.....	102
3.	Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin	103
4.	Camat.....	104
5.	Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi	104
C.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	105
1.	Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	105
2.	Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	106
3.	POLRI Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	107
D.	Pengurus Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik	108
1.	Data Organisasi Sosial, Masyarakat dan Politik.....	108

2. Pengurus Harian Partai Politik.....	110
3. Kaukus Perempuan Politik.....	111
BAB IX BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	113
A. Kasus kriminalitas yang ditangani	114
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi	115
1. Anak Terlantar	115
2. Anak yang ditampung di Panti Asuhan	116
3. Bekas warga Binaan Lembaga pemasyarakatan	116
4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	116
5. Penyandang Disabilitas	117
6. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja sosial di Kota Bukittinggi tahun 2021	118
7. Kumpulan Peraturan Dan Kebijakan Kota Bukittinggi Yang Responsif Gender	119
8. Perkawinan Dan Perceraian	120
BAB X KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	123
A. Kekerasan Terhadap Perempuan	124
B. Kekerasan Terhadap Anak	132
BAB XI INDEKS KUALITAS KELUARGA	136
A. Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	137
B. Dimensi 2. Ketahanan Fisik	140
C. Dimensi 3. Ketahanan Ekonomi	141
D. Dimensi 4. Ketahanan Sosial Psikologi	143
E. Dimensi 5. Ketahanan Sosial Budaya	144
BAB XI PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
1. Ketersediaan data	146
2. Konstruksi Gender	146
3. Kependudukan	147
4. Pendidikan	148
5. Kesehatan	148
6. Ekonomi dan ketenagakerjaan	149
7. Politik dan pengambilan keputusan	150
8. Hukum dan social budaya	150
9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak	151
10. Indeks ketahanan keluarga	151
B. Saran	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	17
Tabel 3.2	Persentase Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Bukittinggi 2018-2022.	19
Tabel 3.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi, 2022	21
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	23
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.	25
Tabel 3.6	Persentase Penduduk umur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan status Perkawinan Tahun 2022	27
Tabel 3.7	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	27
Tabel 5.1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 sd 18 tahun berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2022	42
Tabel 5.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022	43
Tabel 5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD,SLTP,SLTA Di Kota Bukittinggi Tahun 2022	45
Tabel 5.4	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2022.	46
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi,	49
Tabel 6.1	Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	57
Tabel 6.2	Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	59
Tabel 6.3	Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	60
Tabel 6.4	Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2022.	62

Tabel 6.5	Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	66
Tabel 6.6	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.	67
Tabel 6.7	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U ,TB/U, dan BB/TB menurut Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2022	68
Tabel 6.8	Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	70
Tabel 6.9	Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Bukittinggi Tahun 2020 s/d 2022	71 73
Tabel. 6.10	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif di Kota Bukittinggi Tahun 2022	
Tabel 6.11	Peserta KB aktif Menurut jenis kontrasepsi.Kecamatan Kota Bukittinggi tahun 2022	74
Tabel 6.12	Usia Perkawinan Pertama PUS Per Kecamatan hasil pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi tahun 2022	75
Tabel 6.13	Jumlah Kelahiran Angka ASFR dan TFR Kota Bukittinggi Tahun 2022	77
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	79
Tabel 7.2	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Stus Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2022	84
Tabel 7.3	Presentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2022	86
Tabel 7.4	Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2022	89
Tabel 7.5.	Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	89
Tabel 7.6	Pelatihan Produktivitas Tahun 2022	90
Tabel 7.7	Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	92
Tabel 7.8.	Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	92
Tabel 7.9	Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal	93

Tabel 7.10	Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2022 di Kota Bukittinggi	93
Tabel 7.11	Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2022.	84
Tabel 8.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2022	98
Tabel 8.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2022.	100
Tabel 8.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022	101
Tabel 8.4	Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022	102
Tabel 8.5	Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.	103
Tabel 8.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	103
Tabel 8.7	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2022	104
Tabel 8.8	Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.	105
Tabel 8.9	Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2022.	106
Tabel 8.10.	Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	106
Tabel 8.11	Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	107
Tabel 8.12	Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2022	108
Tabel 8.13.	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	110
Tabel 9.1	Jumlah Kriminal menurut Jenis Kejadian di Kota Bukittinggi, 2022	114
Tabel 9.2	Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, sampai dengan 2022	116
Tabel 9.3.	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017s/d 2022	116

Tabel 9.4	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	118
Tabel 9.5	Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2022	118
Tabel 9.6	Daftar Perda / Perwako Kota Bukittinggi yang Mendukung Perempuan dan Anak Tahun 2020 s/d 2022	119
Tabel 9.7	Jumlah Peristiwa Nikah di Kota Bukittinggi	121
Tabel. 10.1	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di Kota Bukittinggi Tahun 2022	124
Tabel. 10.2	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	125
Tabel 10.3	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	125
Tabel 10.4	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	126
Tabel 10.5	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	127
Tabel. 10.6	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2022	128
Tabel. 10.7	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi	129
Tabel. 10.8	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi	129
Tabel 10.9	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi	130
Tabel 10.10	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi	130
Tabel 10.11	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Hubungan dengan korban di kota Bukittinggi	131
Tabel 10.12	Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin	132
Tabel.10.13	Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2022	134
Tabel.10.14	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2022	135

. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	14
Gambar 3.1	Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	24
Gambar 3.2	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022	28
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2022	32
Gambar 4.2	Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2022.	33
Gambar 4.3	Angka harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	33
Gambar 4.4	Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.	34
Gambar 4.5	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional , Propinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai 2022.	35
Gambar 4.6	Grafik Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai 2022	36
Gambar 4.7	Grafik Perempuan sebagai tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan 2022	37
Gambar 4.8	Grafik Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan 2022	38
Gambar 5.1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Bukittinggi 2017-2022	47
Gambar 6.1	Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022	53

Gambar 6.2	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2022	55
Gambar 6.3	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022.	63
Gambar 6.4	Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	64
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2017-2022	85
Gambar 9.1	Jumlah Anak Terlantar Tahun 2018 sd 2022 di Kota Bukittinggi	115
Gambar 9.2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2021.	117



Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender

Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak

Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penurunan Pekerja Anak

Pencegahan Perkawinan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam pedoman ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2022 hasil proyeksi penduduk sebanyak 121.588 jiwa yang terdiri dari 60.816 jiwa laki-laki dan 60.772 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 100,07. Rasio ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terdapat jumlah yang seimbang. Artinya keberadaan perempuan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki. Dibanding tahun lalu telah terjadi penurunan jumlah penduduk sekitar 560 jiwa. Struktur umur penduduk Bukittinggi masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 25,41 persen, sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk lebih seperempat penduduk Bukittinggi.

Gambaran kondisi perempuan dan anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambil kebijakan yang tepat. Perempuan dan anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik saat ini ataupun potensi untuk masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks pembangunan Manusia (IPM), atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Upaya dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah , serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023”** sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi secara menyeluruh di berbagai bidang kondisi data tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Profil Gender dan Anak Tahun 2023” dimaksudkan untuk melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi yang berbasis data terpilah yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu penulisan buku ini dapat memberikan gambaran secara umumberdasarkan aspek disperitas baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Bukittinggi tahun 2023 memiliki tujuan;

1. Tersedianya data terpilah Perempuan dan Anak di bidang Pendidikan, kesehatan, Ekonomi, Peran Perempuan di sektor publik, dan bidang-bidang yang menjadi isu Perempuan dan Anak di Kota Bukittinggi
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat Kota Bukittinggi terkait upaya pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi

3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi . Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor Publik, bidang Pemerintahan, posisi di Parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

D. Kegunaan Buku Profile Gender dan Anak

1. Untuk memberikan rekomendasi bagi semua pihak khususnya bagi penyusunan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.
2. Dengan tersedianya informasi yang ada dapat mendorong capaian pembangunan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

E. Sumber Data

Data –data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2023 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi , Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Instansi Vertikal di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-...../2023 tanggal 2023.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematikanya dimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok kelembagaan sistem data gender dan anak, selanjutnya adalah implementasinya berupa

pengumpulan dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender. Rincian sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Gambaran Umum Wilayah
- 3) Bab III Struktur Kependudukan
- 4) Bab IV Konstruksi Gender
- 5) Bab V Gender dan Anak di Bidang Pendidikan
- 6) Bab VI Gender dan Anak di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
- 7) Bab VII Gender dan Anak di Bidang Ketenagakerjaan
- 8) Bab VIII Perempuan di Sektor Publik Dan Pengambil Keputusan
- 9) Bab IX Gender dan Anak di Bidang Hukum dan Sosial Budaya
- 10) Bab X Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 11) Bab XI Penutup

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penulisan profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi , lebih spesifik diperjelas dengan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Maksud dan tujuan diperuntukkan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah dilaksanakan terhadap perempuan dan anak, dari mana sumber data. Diakhir bab ini ditutup dengan Sistematika penulisan buku Profil Gender dan Anak.

Bab II Gambaran Umum Wilayah

Memuat tentang gambaran letak geografis , batas administrasi wilayah serta visi dan misi Kota Bukittinggi

Bab III Struktur Kependudukan

Dalam bab ini memuat informasi tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin, penduduk produktif, penyebaran penduduk, kepemilikan KTP,

akte kelahiran, Kartu Keluarga, penduduk miskin, status perkawinan dan Kepala keluarga perempuan.

Bab IV Konstruksi Gender

Pada bab ini dijelaskan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi dan dibandingkan dengan capaian di tingkat propinsi Sumatera Barat dan beberapa tahun terakhir.

Bab V Gender dan Anak Bidang Pendidikan

Memuat kondisi pendidikan di Kota Bukittinggi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian diuraikan dengan angka terkait berdasarkan angka usia angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, sertifikasi guru, angka kelulusan paket A ,B dan C , SLB dan penggunaan Teknologi Informasi.

Bab VI Gender dan Anak Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pada umum ini disampaikan data terkait angka kematian ibu, penyebab kematian serta upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi untuk peningkatan status kesehatan di Kota Bukittinggi, , Data HIV AIDS, Keluarga Berencana , usia Perkawinan Pertama serta Penggunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bab VII Gender dan Anak Bidang Ketenagakerjaan

Bab ini menjelaskan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Status Pekerjaan , lapangan Usaha, pekerja sector formal dan informal, Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Koperasi dan keterlibatan perempuan disektor ekonomi lainnya.

Bab VIII Perempuan di Sektor Publik Dan Pengambil Keputusan

Untuk perempuan dan pengambil keputusan, dalam bab ini memuat data yang berkaitan dengan pengambil keputusan langsung di pemerintahan dan dari sudut pandang partisipasi baik laki-laki maupun perempuan di bidang **Legislatif** yaitu; jumlah anggota partai politik menurut jenis kelamin dan jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin. Sedangkan di bidang **Eksekutif** memuat data tentang PNS menurut golongan jabatan dan jenis kelamin, dan PNS OPD menurut jenis kelamin. Dalam bidang **Yudikatif** yaitu memuat data jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi menurut jenis kelamin di wilayah Kota Bukittinggi.

Bab IX Gender dan Anak Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Dijelaskan pada Bab ini tentang kasus terkait Hukum, kebijakan terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Anak serta kebijakan yang Responsive Gender, kebijakan terkait perempuan dan anak, Lembaga yang terkait peduli perempuan dan anak, serta data terkait bidang social dan budaya.

Bab X Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Digambarkan dalam bab ini tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan, lokasi, latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang terkait dengan data tersebut.

Bab XI Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°22' 03" Bujur Timur dan antara 00°17' 08" Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

B. Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara :

berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan:

berbatasan dengan Taluak IV Suku; Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.

3. Sebelah Barat :

berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.

4. Sebelah Timur:

berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiingin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Gambar 2.1. Peta Kota Bukittinggi.



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Mandiangin Koto Selayan (MKS)	12,156	48
2.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
3.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2022.

C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

VISI

“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”

MISI

1. "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
2. "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
3. "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga.
5. "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
6. "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

Humanis; Enterpreneur; Bijak; Agamais/Adil; Tauladan

BAB III

STRUKTUR KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 122.311 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi sebesar 100,14 %. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki. Angka sex ratio 100,14 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir sama banyak dengan penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	KELOM- POK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREM- PUAN	LAKI-LAKI + PEREM- PUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 – 4	5,496	5,202	10,698	105.65
2	5 – 9	5,069	4,888	9,957	103.70
3	10 – 14	5,142	4,849	9,991	106.04
4	15 – 19	5,062	4,792	9,854	105.63
5	20 – 24	5,024	5,131	10,155	97.91
6	25 – 29	5,393	5,384	10,777	100.17
7	30 – 34	5,042	4,967	10,009	101.51
8	35 – 39	4,558	4,506	9,064	101.15
9	40 – 44	4,178	4,102	8,280	101.85
10	45 – 49	3,965	3,963	7,928	100.05
11	50 – 54	3,387	3,538	6,925	95.73
12	55 – 59	3,024	2,985	6,009	101.31
13	60 – 64	2,304	2,317	4,621	99.44
14	65 – 69	1,627	1,754	3,381	92.76
15	70 – 74	962	1,220	2,182	78.85
16	75+	965	1,515	2,480	63.70
JUMLAH		61,198	61,113	122,311	100,14

Sumber: BPS Kota Bukittinggi. 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa menurut kelompok usia terdapat beberapa kecenderungan, diantaranya penduduk lansia (> 65 tahun)

perempuan (4489 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lansia (> 65 tahun) laki-laki 3554 jiwa. Hal ini menunjukkan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Bila pembahasan difokuskan kepada perempuan terlihat bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 32.845 jiwa (26,85 % dari jumlah seluruh penduduk Bukittinggi). Ini berarti secara biologis adalah usia reproduksi yang akan berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

B. Penduduk Produktif / Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua.

Angka Beban Ketergantungan Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan yang kecil akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 3.2. Persentase Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Bukittinggi 2018-2022.

Tahun	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (persen)
2018	27,19	67,96	4,85	47,14
2019	26,98	68,01	5,00	47,03
2020	26,74	68,08	5,18	46,88
2021	25,41	68,28	6,30	46,45
2022	25,06	68,37	6,58	46,27

Catatan : *menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010 - 2035

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) yang sering tergantung secara ekonomi

Dependensi ratio Kota Bukittinggi adalah 46,27 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.

Jika dilihat dari sisi ekonomi maka kelompok usia 15 sampai 64 tahun terdapat 41.685 jiwa penduduk perempuan yang masuk usia perempuan produktif. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan tersebut serta mendukung ekonomi keluarganya. Untuk itu bagi perempuan yang belum bekerja perlu mendapatkan pembinaan dan

pembekalan keterampilan untuk berusaha. Angkatan kerja perempuan akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan apabila jumlah angka tersebut memenuhi persyaratan, Pertama jumlah penduduk perempuan yang terjun kepasar kerja (angkatan kerja) harus optimal. Angka ketergantungan tidak terlalu tinggi artinya jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tidak terlalu tinggi.

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pada tabel diatas terlihat, angka ketergantungan usia muda lebih besar dari pada angka ketergantungan usia tua, hal ini akan berdampak kepada fasilitas sosial dan ekonomi yang mesti dipersiapkan , seperti fasilitas kesehatan, pendidikan , ekonomi dan fasilitas lainnya yang mendukung terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, oleh sebab itu prioritas pembangunan hendaklah lebih memprioritaskan kepada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi

kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

C. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi, 2022.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jml Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Guguk Panjang	6.831	41.294	33,76	6.045	0,16
2.	Mandiingin K. Selayan	12.156	54.219	44,33	4.460	1,01
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6.252	26.798	21,91	4,286	0,43
Hasil Registrasi		25.239	122.311	100	4.846	0,59

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2023

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Mandiingin Koto Selayan yaitu 54.219 jiwa (44,33%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 26.798 jiwa (21,91 %).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 6 045 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan

Mandiingin Koto Selayan sebanyak 4.460 jiwa per km² dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.286 jiwa per km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sudah tergolong sangat padat, yaitu 4.846 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 4.846 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 meningkat sebanyak 29 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2021 sebesar 4.817 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

Dari Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 secara proyeksi terdapat laju sebesar 0,59 %, terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,46 %.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2022 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 96,12 % penduduk

wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.

Tabel. 3.4. Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

NO	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	%
1	G. Panjang	41.294	33,937	32,660	96.24
2	MKS	54.219	41,404	39,799	96.12
3	ABTB	26.798	20,854	20,000	95.90
JUMLAH		122.311	96195	92.459	96,12

Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2022

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari tahun 2022 dibanding tahun 2021 terjadi penurunan yaitu dari 99,95 % menjadi 96,12 % ditahun 2022.

Penurunan jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik ini disebabkan karena peningkatan warga yang wajib KTP , tidak diiringi dengan warga yang melaksanakan pengurusan kepemilikan KTP.

E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari penduduk usia 0-18 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi sekitar 98 % , , seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022



Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2022

Terlihat dari gambar diatas, masih ada penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran, hal ini akan berpengaruh terhadap persyaratan memasuki sekolah dan dunia kerja .

F. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dibawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
2017	1,68
2018	1,56
2019	1,55
2020	0,81
2021	0,46
2022	0,59

Sumber : BPS Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi, hal ini menggambarkan adanya kebersihan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bukittinggi.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas P3APPKB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut :

- 1, Memfasilitasi alat dan obat Kontrasepsi secara gratis
2. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjaksamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan penyuluh lapangan KB (IpeKB), TNI,TP,PKK
3. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB
4. Memberikan testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses
5. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui mobil penerangan KB (MUPEN)

6. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat
7. Mengkampanyekan hindari 4 T melalui berbagai penyuluhan yaitu:
 - Tidak melahirkan terlalu muda,
 - Tidak melahirkan terlalu tua
 - Tidak melahirkan terlalu banyak
 - Tidak melahirkan terlalu rapat
8. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program:
 - Tidak menikah diusia dini
 - Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
 - Memberikan pemahaman Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Mengembangkan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
10. Menggerakkan Program KB
11. Membentuk dan Mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.

G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk umur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan status Perkawinan Tahun 2022.

Jenis Kelamin	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	
Laki - laki	44.01	53.23	2.77	100
Perempuan	34.19	53.67	12.14	100

* Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2022

H. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilih pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

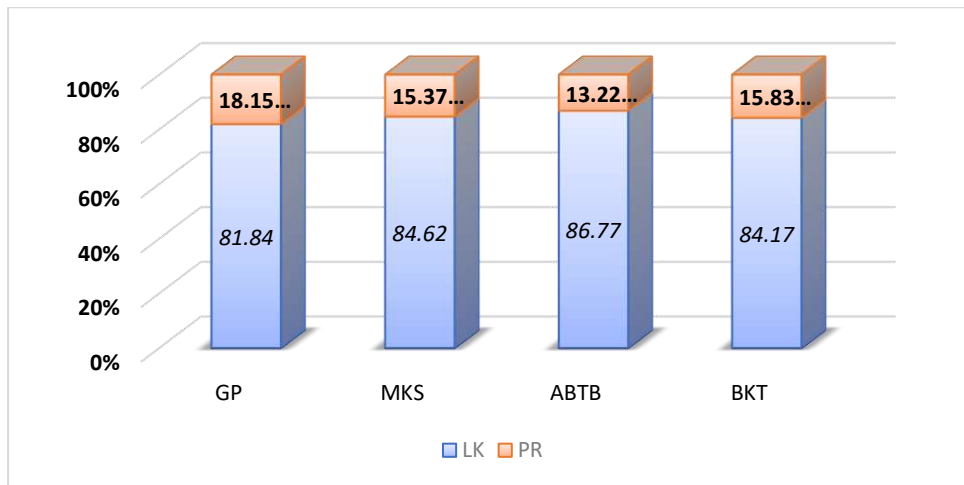
Tabel 3.7. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jml Kepala Keluarga	Laki laki		Perempuan	
			Jml	%	Jml	%
1	Guguk Panjang	8521	6974	81,845	1547	18,155
2	Mandiangan Koto Selayan	10542	8921	84,623	1621	15,377
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5745	4985	86,771	760	13,229
4	Bukittinggi	24808	20880	84,166	3928	15,834

Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

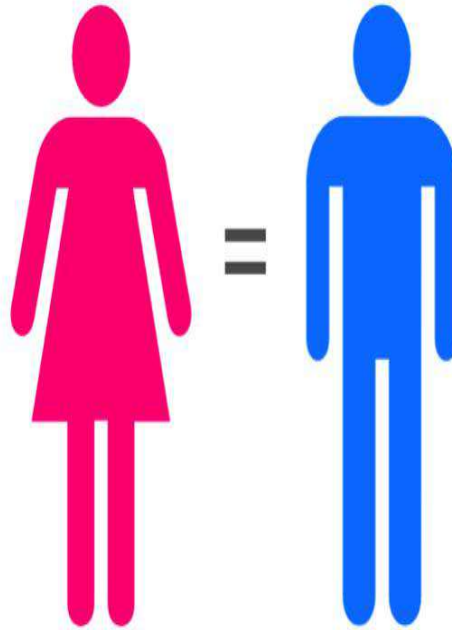
Di bawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut jenis kelamin tahun 2022.

Gambar 3.2. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022.



Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 3928 orang atau 15,83 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.



Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan

BAB IV

KONSTRUKSI GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu

keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah :

1. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai,
2. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab,
3. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG
4. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran,
5. Gender Analisis,
6. Data terpilah
7. Peran masyarakat.

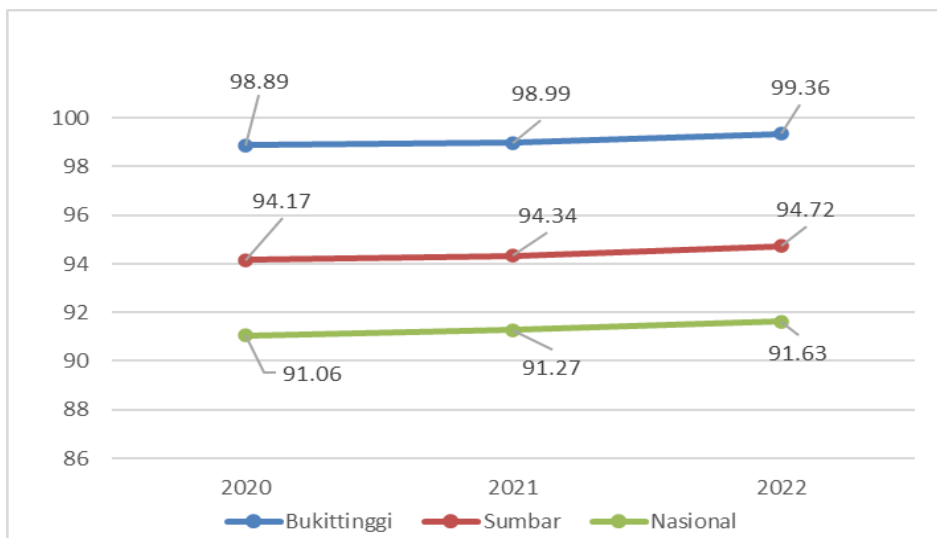
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi pada 3 tahun terakhir , lebih tinggi dari IPG Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2022.



Sumber : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

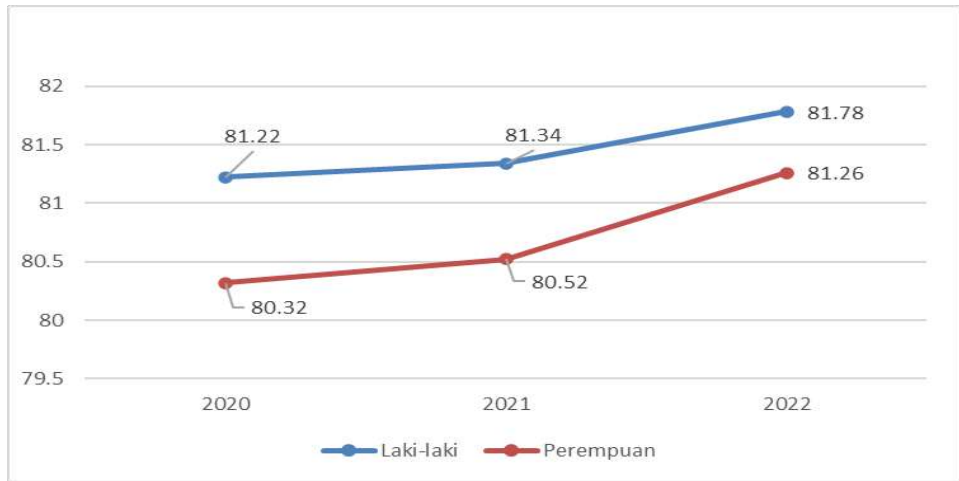
Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life),
- (ii) Pengetahuan (knowledge), dan
- (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

1. IPM Laki-laki dan Perempuan Kota Bukittinggi 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

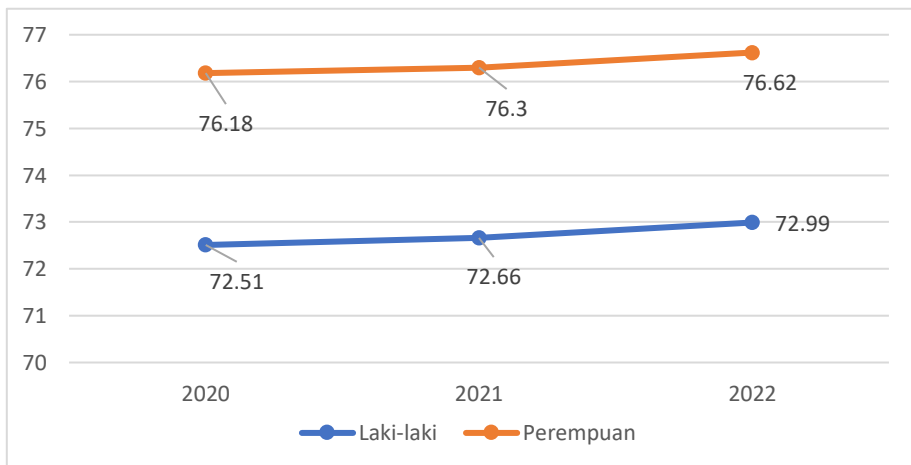
Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.



Sumber : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

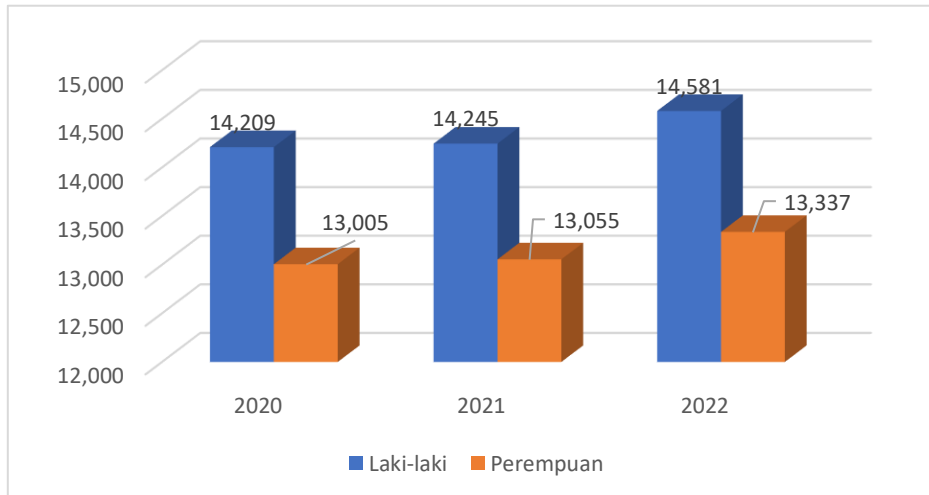
Gambar 4.3 Angka harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.



Sumber : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

3. Pengeluaran Perkapita

Gambar 4.4 Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.



Sumber : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

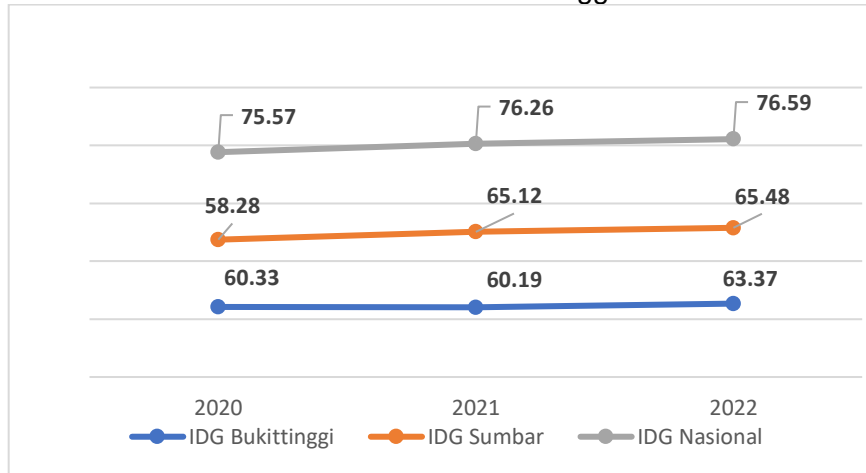
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

Berdasarkan data Statistik , IDG Kota Bukittinggi sejak tahun 2017 masih belum menggembirakan , karena dibandingkan dengan kabupaten Kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Bukittinggi masih belum bisa mengungguli, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut;

Gambar 4.5 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional , Propinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2022.



Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa IDG Kota Bukittinggi mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 , dan meningkat pada tahun 2022, Jika dibandingkan dengan propinsi Sumatera Barat dan Nasional , Bukittinggi masih memiliki IDG yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hal ini bisa dilihat dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

C, Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Jabatan politik menjadi salah satu posisi yang selama ini kurang memberikan ruang bagi perempuan, namun sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, terdapat kuota untuk perempuan, yaitu sekurang-kurangnya 30 persen, baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, calon anggota KPU maupun calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar sudah terkena getar gender (genderquake) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan affirmative action. Pada pemilu

2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU Nomor 8 Tahun 2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55).

Penentuan angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis, melalui keterwakilan di parlemen dalam jumlah yang memadai, menjadi syarat mutlak terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif bagi kepentingan perempuan, serta tidak bias hanya pada kepentingan laki-laki.

Dilihat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, kaum perempuan yang duduk di Parlemen masih 2 orang atau 8 % dari anggota DPRD Kota Bukittinggi, sebagaimana gambar dibawah ini:

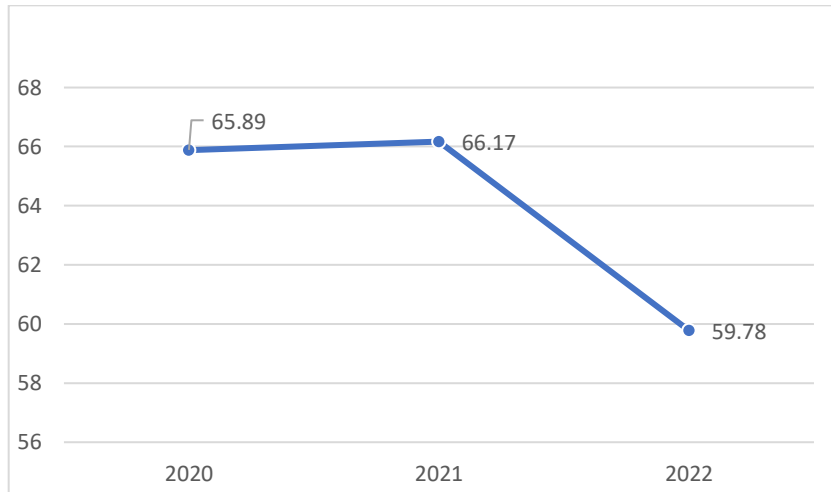
Gambar 4.6 Grafik Presentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai 2022.



Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2023

D. Perempuan sebagai tenaga Profesional

Gambar 4.7 Grafik Perempuan sebagai tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan 2022.



Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2023

Persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional pada 2022 di Kota Bukittinggi mengalami penurunan 6,39 point dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini berarti sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perempuan provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan provinsi yang perempuannya paling banyak menjadi tenaga profesional. Persentasenya mencapai 60,1% pada 2022.

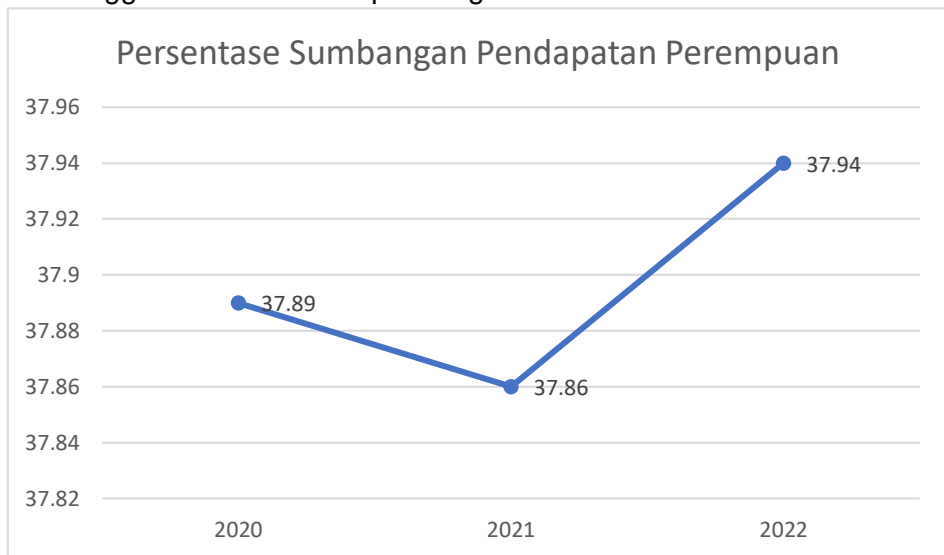
E. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,94% pada tahun 2022. Artinya, perempuan Bukittinggi berkontribusi sebanyak 37,94% terhadap pendapatan keluarga.

Angka ini meningkat 0,08 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 37,86%. Seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.8. Grafik Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan 2022.



Sumber ; BPS Sumatera Barat dalam Angka 2023



BAB V

GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk

menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, angka buta huruf, angka putus sekolah dan akses internet.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 5.1. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 sd 18 tahun berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Partisipasi Sekolah	7-12 Tahun			13-15 Tahun			16-18 Tahun		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	0,31	0	0,15	0	0	0	0	0	0
Masih Sekolah	99,69	100	99,85	96,95	100	98,45	83,3	85,09	84,22
Tidak Sekolah Lagi	0	0	0	3,05	0	1,55	16,70	14,91	15,78

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data Susenas, terlihat Partisipasi Sekolah pada Perempuan kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun 100 % masih sekolah. Terdapat 3.05 % anak laki laki usia 13-15 tahun tidak sekolah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga penduduk Kota Bukittinggi usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah sudah jarang. APS pada kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur lainnya , yaitu pada jenjang pendidikan SD dan SLTP.

Tingginya Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi disebabkan karena tingginya akses pendidikan untuk penduduk usia sekolah , sehingga kesempatan dalam mengenyam pendidikan semakin besar.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 5.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
SD / MI	108.68	104.04	106.34
SMP / MTs	88.32	85.15	86.77
SMA / MA	101.8	96.25	98.95

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD /MI sebesar 106, 34 %. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor

lain yang menyebabkan APK tahun 2022 melebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

Salah satu penyebab tingginya APK di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukittinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Tabel 5.3. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD,SLTP,SLTA Di Kota Bukittinggi Tahun 2022

Jenjang Pddk	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
SD / MI	99.69	100	99.85
SMP/ MTs	81.13	82.87	81.98
SMA/MA	76.92	78.91	77.94

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada gambar diatas terlihat bahwa APM terendah pada jenjang pendidikan SMA / SMK/ MA. Hal ini menggambarkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat anak yang sekolah tidak tepat waktu, terlalu cepat atau terlalu lambat masuk SMA /SMK / MA.

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (literacy rate). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2022 adalah 99,25, laki-laki sebesar 99,52 % dan perempuan 99,73%. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2019 sampai 2022

No	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	99,46	99,91	99,5	99,52
2	Perempuan	99,69	100	100	99,73
	Bukittinggi	99,58	99,96	99,71	99,25

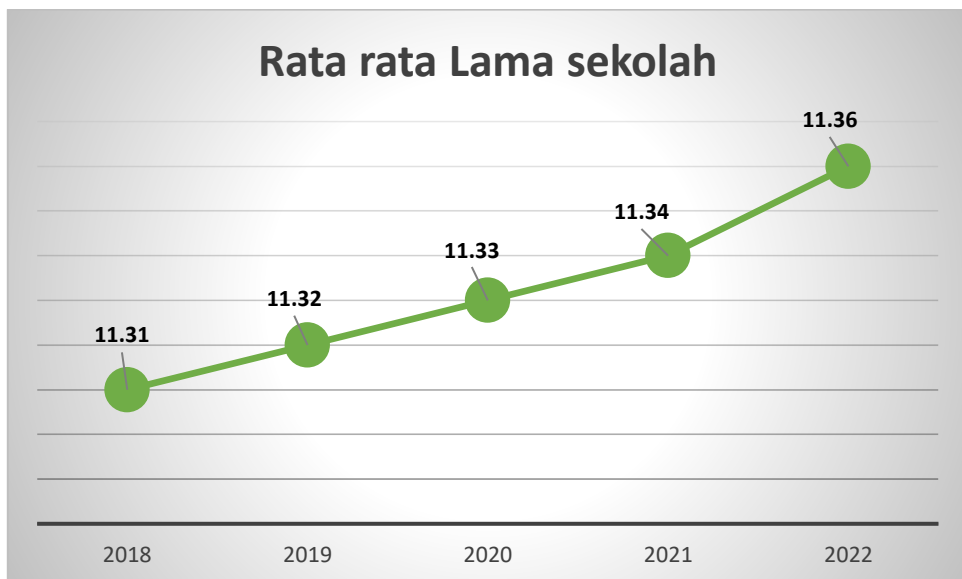
Sumber Data : BPS Tahun 2022

Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada tahun 2021 masih ada sekitar 0,75 persen penduduk Kota Bukittinggi usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar satu orang yang buta huruf. Dari Angka Melek Huruf penduduk di Kota Bukittinggi berfluktuasi dari tahun 2019 sampai 2022. Peningkatan terjadi dari 99,58 persen pada tahun 2019 menjadi 99,96 persen pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 99,71 persen pada tahun 2021 dan manurun lagi di tahun 2022. Namun, pencapaian AMH tersebut masih menunjukkan bahwa angka buta huruf Kota Bukittinggi tercatat sudah di bawah 1 persen

E. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Gambar 5.1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Bukittinggi 2017-2022



Sumber : : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2023, IPM 2022.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk Propinsi Sumatera Barat adalah 8,92 tahun, sedangkan untuk Kota Bukittinggi, rata-rata lama sekolah 11,34 (tahun 2021). Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah

Kota Bukittinggi sebesar 11,30 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2021 mencapai 11,34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak mampu menempuh pendidikan selama 11-12 tahun atau setara kelas dua SMA, yang berarti rata-rata penduduk di Kota Bukittinggi dapat menamatkan sekolah hingga jenjang SMP sehingga pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

F. TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP).

Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian program wajib belajar 9 tahun adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar. Gambaran mengenai pendidikan penduduk Kota Bukittinggi dapat terlihat dari Tabel 5.5. yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SLTP ke atas sebesar 82,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi masih dapat dikatakan sudah cukup baik. Artinya lebih dari tiga perempat penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 15 tahun ke atas telah mengikuti program pemerintah, yaitu mencapai paling kurang tamat SLTP "Wajib Belajar 9

Tahun”. Penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah lulusan SMA sederajat yaitu sebesar 42,02 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya lulusan SMP sebesar 19,56 persen. Namun, masih ada sekitar 7,25 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi,

No.	Ijazah/ STTB Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	7,67	6,88	7,25
2	SD /MI	11,06	8,66	9,81
3	MP/MTs	21,09	18,15	19,56
4	SMA/ MA	36,67	33,67	34,91
5	SMK/MAK	7,20	7,02	7,11
6	Diploma I/II	0,32	0,69	0,51
7	Akademi / Diploma III	3,59	6,93	5,33
8	D IV / S1/S2/S3	12,42	18,38	15,52
	SMP +	81,28	84,46	82,94

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera barat 2022

Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk berusia 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan relatif memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Masing-masing persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tamat SMP ke atas yaitu 81,28 persen dan 84,46 persen. Penduduk yang lulusan Sekolah Menengah lebih didominasi penduduk laki-laki. Namun, pada

jenjang perguruan tinggi persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada usia yang sama. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh budaya laki-laki yang memiliki kecenderungan lebih memilih bekerja untuk membantu tanggungjawab ekonomi keluarga



BAB VI

BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan (morbidity rate) , juga bisa dilihat pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Program Keluarga Berencana juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/ cara KB, jenis-jenis alat ber KB yang digunakan dan jumlah anak lahir hidup. Sementara usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat / cara ber KB.

A. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka ini dipandang sebagai bentuk akhir dari upaya peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan gambaran rata-rata usia yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir

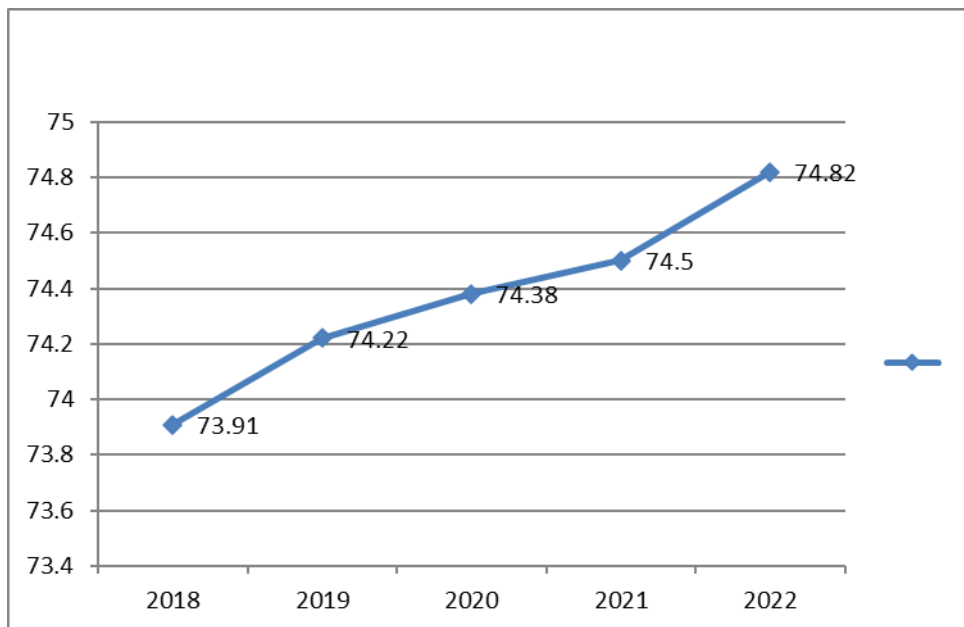
Angka Harapan Hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur.

Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi.

Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022

Gambar 6.1 Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022



Sumber : Diolah dari data BPS Kota Bukittinggi Tahun 2022

Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya semakin baik dan teraksesnya

pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

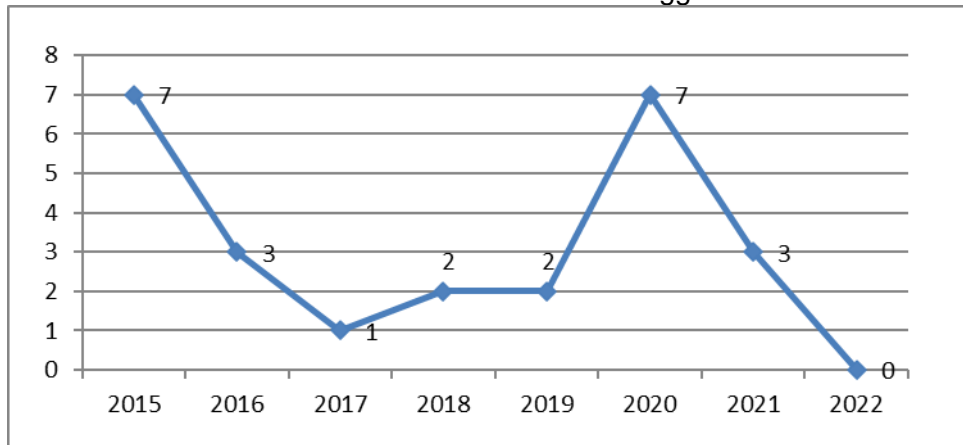
Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 6.2 berikut terlihat kecenderungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 di Kota Bukittinggi.

Gambar 6.2. Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tidak ada kasus kematian ibu melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2022 Kasus ini menurun dibandingkan kasus tahun sebelumnya.

Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menurunkan Angka Kematian ibu salah satunya adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan . Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

1. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan .

Usaha pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik. Sebelum pandemi, terjadi peningkatan penggunaan jasa tenaga medis sebagai penolong persalinan. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan 1,79 persen dibanding tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 1,79 persen perempuan melahirkan lebih memilih untuk tidak melibatkan tenaga kesehatan dalam proses kelahirannya, salah satu penyebabnya adalah ketakutan akan terpapar virus covid19. Kemudian pada tahun 2021 masyarakat kembali mempercayakan tenaga kesehatan dalam proses persalinannya. Untuk tahun 2022, seluruh peristiwa persalinan yaitu 2286 persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu

hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan ante natal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1. Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4		Bumil Resti	
			JML	%	JML	%	JML	Dapat Yankes
1	Guguk Panjang	1024	934	91.21	906	88.48	106	106
2	Mandiingin Koto Selayan	1101	1076	97.73	1037	94.19	157	157
3	Aur Birugo Tigo Baleh	541	541	100.00	573	105.91	99	99
	Bukittinggi	2666	2551	96.31	2516	96.19	362	362

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 96,31 % ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal

sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan sebanyak 96,19 %.

Untuk pelaksanaan ANC terpadu pada Ibu Hamil, Dinas kesehatan melalui UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan yang berintegrasi dengan program lain, antar lain :

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA)
- Pencegahan malaria dalam Kehamilan (PMDK)
- TB dalam Kehamilan
- Kecacingan dalam Kehamilan
- Pencegahan IMS dalam Kehamilan
- Pencegahan Hepatitis B dalam Kehamilan
- Pemeriksaan Hb,KEK,Protein Urin, Gula Darah
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

3. Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil

Vaksin DTP jenis Tdap, direkomendasikan untuk diberikan pada **ibu hamil** di usia kehamilan 27-36 minggu atau segera setelah bayi lahir. Vaksin ini dapat diberikan, tanpa mempertimbangkan kapan terakhir kali **ibu hamil** mendapatkan vaksin Tdap atau **Td** (tetanus-diphtheria) Immunisasi Vaksin Td yang disuntikkan berisi *booster* (penguat) berupa anti-tokso. Ini berfungsi menguatkan kekebalan tubuh.

Untuk wanita hamil boleh divaksin Td. Syaratnya, wanita hamil baru boleh divaksin difteri pada trimester ke-2 atau trimester ke-3. Karena kalau masih trimester pertama itu usia kehamilannya masih rentan dan bahaya buat pembentukan janin di awal kandungan . Kekebalan tubuh pun baru terbentuk biasanya dua minggu kemudian setelah divaksin.

Tabel 6.2. Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kec	Jml Bumil	Immunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	1024	56	5.47	120	11.72	166	16.21	154	15.04	74	7.23	514	50.20
2	Aur Birugo Tigo Baleh	541	58	10.72	89	16.45	113	20.89	70	12.94	37	6.84	309	57.12
3	Mandiingin Koto Selayan	1101	12	1.09	149	13.53	49	4.45	38	3.45	16	1.45	366	33.24
	Kota Bukittinggi	2666	126	5.76	358	13.90	328	13.85	262	29.50	127	5.17	1189	46.85

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tabel 6.3. Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kec	Jml WUS Tdk Hamil (15-35 TH)	Immunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	7309	11	0.15	36	0.49	92	1.26	33	0.451	10	0.14
2	Aur Birugo Tigo Baleh	6378	62	0.97	100	1.57	132	2.07	79	1.239	41	0.64
3	Mandiingin Koto Selayan	10190	122	1.20	16	0.16	18	0.18	1	0.010	37	0.36
	Kota Bukittinggi	23877	195	0.77	152	0.74	242	1.17	113	0.57	88	0.38

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

4. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim, dan kolagen. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menambah asupan nutrisi pada janin
- Mencegah anemia defisiensi zat besi
- Mencegah pendarahan saat masa persalinan
- Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan

Cakupan pemberian tablet zat besi di Kota Bukittinggi Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.4. Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	FE3 (90 TABLET)	
			JUMLAH	%
1	Guguk Panjang	1024	906	88,4
2	Mandiingin Koto Selayan	1074	793	73,8
3	Aur Birugo Tigo Baleh	541	473	87,4
KotaBukittinggi		2639	2172	82,3

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

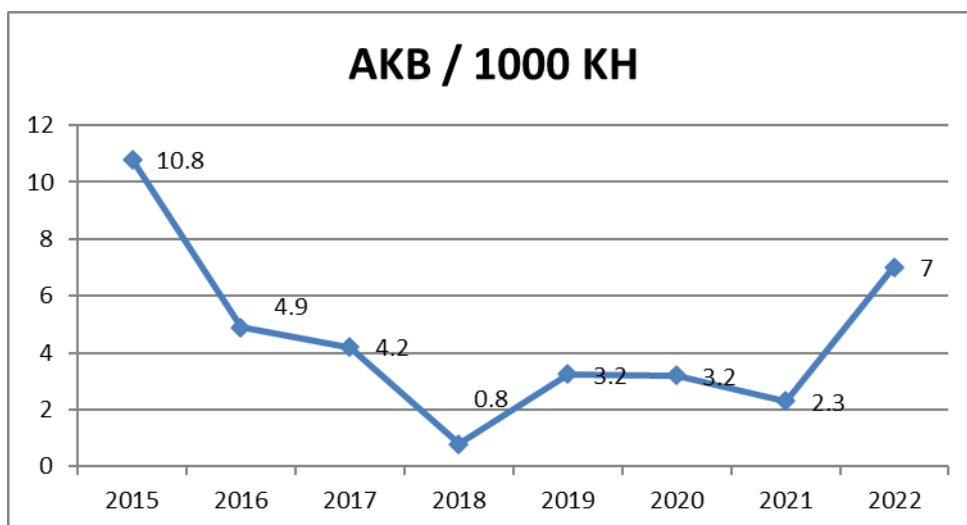
C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah sebanyak 16 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 6,9 /1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan kasus kematian bayi tertinggi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 6.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022.



Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022

Grafik diatas memperlihatkan kasus kematian bayi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Sebab jika tidak, hal ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

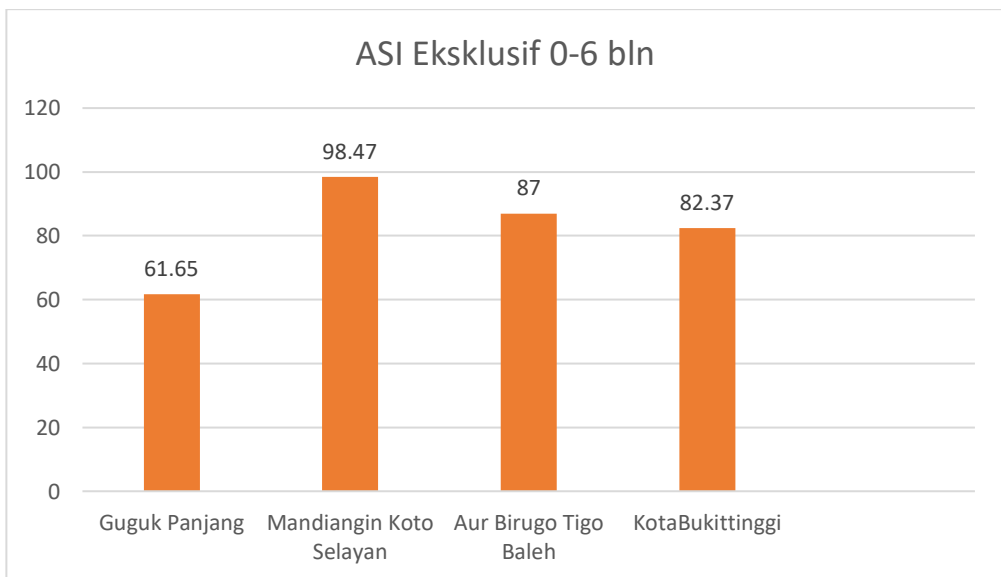
1. Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Gambar berikut ini menyajikan persentase kecenderungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tahun 2022 di Kota Bukittinggi.

Gambar 6.4. Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022



Sumber : : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Data pada gambar di atas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor ;

- Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis

- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan.
- Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI,
- Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)

Apabila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa hampir sama cakupan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif antara laki-lak dan perempuan.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah 1,08%, dimana ditemukan 21 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram . Adapun cakupan BBLR pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.5. Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kecamatan	JML LAHIR HIDUP			BBLR					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	G.Panjang	416	427	843	7	1.68	6	0.01	13	1.54
2	MKS	490	468	958	9	1.84	14	0.03	23	2.40
3	ABTB	215	206	421	6	2.79	6	0.03	12	2.85
	Bukittinggi	1121	1101	2222	22	1.96	26	0.02	48	2.16

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan

Program imunisasi di Kota Bukittinggi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran imunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Imunisasi Dasar Lengkap adalah bayi yang telah mendapatkan semua imunisasi mulai dari HB 0, BCG dan Polio1, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 1 dan Polio 2, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 2 dan Polio 3, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 3 dan Polio 4 serta mendapatkan campak.

Tabel 6.6 Cakupan Immunisasi Dasar Lengkap Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kecamatan	Sasaran			Jumlah Bayi Mendapatkan					
					Immunisasi Lengkap					
		L	P	L+P	Laki-laki		Perempuan		L+P	
					Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	GP	435	457	892	289	66.44	296	64.77	585	65.58
2	ABTB	260	296	556	167	64.23	190	64.19	357	64.21
3	MKS	645	626	1,271	315	48.84	297	47.44	612	48.15
Jumlah		1340	1379	2719	771	57.54	783	56.78	1554	57,15
Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022										

Selama tahun 2022, bayi laki-laki yang telah mendapatkan immunisasi lengkap sebanyak 57,54 % (771 orang) sedangkan untuk bayi perempuan adalah sebanyak 56,78% (783 orang). Dari data diatas terlihat bahwa bayi yang mendapatakan immunisasi lengkap hampir sama laki laki dan perempuan, walaupun secara capaian belum sesuai yang diharapkan.

4. Status Gizi pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di Kota Bukittinggi, ditemukan 527 orang Balita yang underweight 7,96% Balita yang berstatus gizi sangat kurang 1,86% dan berstatus gizi kurang 6,1 %. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.7. STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

NO	KEC	JUMLAH BALITA YG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA YG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		BALITA GIZI KURANG (BB/TB <-2 SD-3 SDS))		BALITA GIZI BURUK (BB/TB <-3 SD)	
			JML	%		JML	%	JML	%	JML	%
1	G.P	1622	128	7,8	1160	85	7,3	77	6,6	1	0,08
2	MKS	2175	170	7,8	2175	237	10,9	66	3	14	0,6
3	ABTB	1474	89	6,0	1474	117	7,9	64	4,3	2	0,13
	BKT	5271	387	7,3	4809	439	9,1	207	4,3	17	0,35

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa Balita yang berstatus gizi kurang sesuai indikator BB/U masih ditemukan sebanyak 7,3 % . Sedangkan status gizi berdasarkan indikator BB/TB , masih terdapat Balita yang berstatus gizi kurang sebanyak 4,3 % dan gizi buruk sebesar 4,3 %.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gizi kurang dan gizi buruk atau *underweight* pada anak, diantaranya disebabkan oleh terbatasnya asupan makan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Disamping itu adanya infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik.

Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa masih terdapat 9,1 % Balita yang bersatus pendek (*Stunting*). *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang salah, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kekurangan gizi kronis ini berakibat anak menjadi pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Masalah kesehatan ini atau *stunting* merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Faktor lainnya antara lain berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah (BBLR).

Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Selain itu yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan *stunting* pada anak, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan).
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

- Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Untuk mencegahnya, peningkatan upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan, seperti penanganan gizi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan baduta. Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain konseling gizi untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui, kelas ibu di setiap puskesmas, sosialisasi dan praktik PMBA di wilayah, optimalisasi kegiatan KP-Ibu, dan optimalisasi kader yang sudah dilatih PMBA (di meja 4 posyandu).

D. Posyandu

Tabel 6.8. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jml	Posyandu Aktif	
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		Jml	%
1	GP	0	0	49	8	57	57	100
2	ABTB	0	9	5	17	31	22	68,75
3	MKS	6	0	22	10	38	33	86,84
Jumlah		6	9	76	35	126	112	88,89

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa masih terdapat posyandu yang berstrata Pratama, dan rata rata Posyandu di Kota Bukittinggi berstrata Purnama.

Dilihat dari jumlah posyandu yang aktif, hanya 88,89 % yang masih aktif, hal ini perlu menjadi perhatian semua sektor untuk kembali menumbuh aktifkan semua posyandu yang ada.

E. Penderita HIV /AID

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Kasus penderita HIV AIDS di Kota Bukittinggi semakin tahun semakin bertambah, terlihat pada tabel 6.9 dibawah ini .

Tabel 6.9. : Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Bukittinggi Tahun 2020 s/d 2022

TAHUN	HIV	AIDS
2020	34	19
2021	27	16
2022	63	36

Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Th 2022

Dari table diatas terlihat tahun 2022 terjadinya peningkatan kasus HIV AIDS lebih dari 100 %, hal ini cukup mengkhawatirkan. Komulatif kasus HIV yang ditemukan sampai tahun 2022 adalah sebanyak 1064 orang, yang mendominasi usia 25 sampai 49 tahun.

Selama ini pemerintah dan akdemisi terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang langkah Langkah pencegahan terhadap penularan HIV AIDS. Penularan HIV AIDS saat ini berbeda dengan penularan 10 tahun yang lalu, yaitu dahulunya lebih sering melalui jarum suntik, akan tetapi saat ini lebih banyak disebabkan oleh aktivitas seks beresiko.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah melalui pendalaman karakter terutama kepada remaja dalam pergaulannya.

F. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sejak tahun 1990 an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga dari pada kuantitasnya.

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah kader yang berada ditingkat RW.

Disamping itu, untuk pembentukan keluarga yang berkualitas juga terdapat kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) , yang merupakan wadah yang tepat untuk membimbing dan membina serta memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Untuk sumber Informasi juga dilaksanakan Pusat Informasi dan Konseling **Remaja (PIK Remaja)** yang merupakan wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk **remaja** guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi **Remaja** serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Wadah lain yang dilaksanakan tidak hanya ditujukan kepada keluarga anak dan remaja, tetapi juga untuk keluarga lansia melalui kegiatan Bina

Keluarga Lansia . Tujuan BKL meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran anggota keluarga sehingga dapat terbentuk lansia yang produktif, aktif, mandiri, sehat dan tangguh.

Program lain yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pembentukan kelompok UPPKS. Kelompok UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera.

Dibawah ini adalah jumlah BKB , BKR, BKL, Pik R dan UPPKS yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Tabel. 6.10 Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Nama kelompok	Jumlah
1.	Koalisi Kependudukan	Kota Bukittinggi
1	IPeKB	
2	PPKBK	24
3	Sub PPKBK	165
4	BKB	59
5	BKR	23
6	BKL	27
7	PIK R	23
8	UPPKA	26
9	Pokja Kampung KB	12

Sumber : DP3APPKB Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dalam beberapa dekade terakhir dianggap lebih lambat apabila dibandingkan dengan periode sebelum 1980. Hal berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain program KB, ada berbagai cara lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk.

. Tabel 6.11. : PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

KEC.	JML PUS	PESERTA KB AKTIF															
		KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%
GP	13804	377	2.73	725	5.25	224	1.62	628	4.55	20	0.14	201	1.46	191	1.38	2366	17.14
MKS	7988	511	6.40	925	11.58	300	3.76	1037	12.98	13	0.16	190	2.38	184	2.30	3160	39.56
ABTB	4478	397	8.87	520	11.61	132	2.95	400	8.93	4	0.09	158	3.53	100	2.23	1711	38.21
Bukittinggi	26270	1285	4.89	2170	8.26	656	2.50	2065	7.86	37	0.14	549	2.09	475	1.81	7237	27.55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi .

G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bias mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hidup.

Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.12.Usia Perkawinan Pertama PUS Per Kecamatan hasil pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi tahun 2022

No	Kecamatan	JML PUS	PEREMPUAN				LAKI-LAKI			
			<19 TAHUN		≥ 19 TAHUN		< 25TAHUN		≥ 25 TAHUN	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	G. Panjang	4.371	256	5,86	4.115	94,14	1.009	23,08	3.362	76,92
2	MKS	5.900	274	4,64	5.626	95,36	1.302	22,07	4.598	77,98
3	ABTB	3.417	137	4,01	3.280	95,99	660	19,32	2.757	80,68
Jumlah		13.688	667	4,87	13.021	95,13	2.971	21,71	11.717	78,29

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakiran 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 4,87 % perempuan yang menikah diusia muda kurang dari 19 tahun dan 21,71 % laki-laki menikah diusia kurang dari 25 tahun. Terlihat bahwa perkawinan pertama di Kota

Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 19 tahun pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun pada laki-laki.

Dampak dari perkawinan usia anak adalah mimicu perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Perkawinan usia muda juga menyebabkan rahim masih belum siap. Apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu,”

H. ASFR dan TFR

Angka kelahiran remaja/**Age Specific Fertility Rate (ASFR)** 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun

Angka TFR yang tinggi mencerminkan rata-rata usia kawin yang rendah yang dapat dikaji melalui perhitungan angka kelahiran menurut umur (Age Spesific Fertility Rate), tingkat pendidikan yang rendah, tingkat sosial ekonomi yang rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi.

ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan, yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan kelompok umurnya. Secara ilmiah potensi perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur, dan stril setelah usia 49 tahun.

Berikut adalah jumlah kelahiran Angka ASFR dan TFR Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Tabel 6.13 Jumlah Kelahiran Angka ASFR dan TFR Kota Bukittinggi tahun 2022.

No	Kelompok Umur	Jumlah Perempuan	Jumlah Kelahiran Hidup	ASFR	TFR
1.	15-19	7547	68	9,01	45
	20-24	8039	277	28,24	141,19
	25-29	5333	681	127,70	638,52
	30-34	4808	682	141,84	709,18
	35-39	4497	455	101,18	505,88
	40-44	4305	115	26,71	133,55
	45-49	3706	45	12,14	60,71
	JUMLAH			446,82	2234,08
	TFR				2,23

Sumber : DP3APPKB Tahun 2023

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Pada tahun 2022 jumlah laki-laki usia 15 tahun keatas adalah 38.169 jiwa, sedangkan perempuan 25.836 jiwa.

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja			
	1. Bekerja	38.169	25.836	64.005
	2. Pengangguran	1.809	1.486	3.295
II	Bukan Angkatan Kerja			
	1. Sekolah	5.352	8.405	13.757
	2. Mengurus rumah tangga	1.806	16.371	18.177
	3. Lainnya	3.019	2.194	5.213
	Jumlah	50.155	54.292	104.447
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	79,71	50,32	64,43
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	5,44	4.90

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021, Hasil Sarkernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sebanyak 79,71, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 77,07 %. Hal ini berarti sebanyak 80 dari 100 orang penduduk usia kerja termasuk dalam angkatan kerja. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 64.005 orang dan pengangguran 3.295 orang. Angka pengangguran ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 yaitu 4.209 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki

79,71% berbanding 50,32% perempuan. Sebaliknya perempuan yang bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 54.292 orang berbanding dengan laki-laki sebanyak 50.155 orang

Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga yaitu sebanyak 16.371 orang dan sekolah 8.405 orang .

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Terdapat perbedaan antara persentase antara pengangguran laki-laki dan perempuan. Pengangguran pada laki-laki sebanyak 4,52 % sedangkan pengangguran pada perempuan adalah 5,44%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat pengangguran tahun 2022 mengalami penurunan 1,19 %. Hal ini berarti semakin menurun angka TPT mengindikasikan bahwa semakin berkurang pengangguran di Kota Bukittinggi, yang berarti perekonomian di Kota Bukittinggi semakin bergerak maju dari sebelumnya.

C. STATUS PEKERJAAN

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar, uraiannya antara lain :

1. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja tidak dibayar dan/atau buruh atau pekerja tidak tetap.
3. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap juga termasuk kelompok buruh atau karyawan ini, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang atau rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan, batasannya adalah tiga bulan. Kemudian majikan bisa lebih dari satu bila majikan tersebut adalah instansi atau lembaga

5. Pekerja bebas dibedakan menjadi dua, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Berikut penjelasan masing-masing kategori tersebut.
 - a. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian, baik berupah rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian di sini meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, serta jasa pertanian.
 - b. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha nonpertanian meliputi usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi atau persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan
6. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar terdiri atas:
 - Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri atau anak yang membantu suaminya atau ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
 - Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang

dibantunya, seperti saudara yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar

- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar

Status pekerjaan utama penduduk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel.7.2...berikut ini :

Tabel.7.2.Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Berusaha sendiri.	10,695	5,373	16,068
2	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar.	3,555	2,131	5,689
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.	2,350	709	3,059
4	Buruh/karyawan/ pegawai.	17,456	11,878	29,334
5	Pekerja bebas	1,685	816	2,501
6	Pekerja keluarga/ tak dibayar	2,425	4,929	7,354
	Total	34,169	25,836	64,005

Sumber: Sakernas BPS Kota Bukittinggi 2022

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Tabel 7.2, penduduk Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 29 334 (45,83 persen). Sedangkan sebagai pekerja yang berusaha sendiri merupakan posisi kedua yaitu 25,1 persen. Sedangkan status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar dua kali lipat dibandingkan dengan laki- laki.

D. Jumlah Jam kerja

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia harus memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendapatan diperoleh jika manusia memiliki pekerjaan atau bekerja. Bekerja, menurut operasional BPS, adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu

Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).

Tabel.7.3 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Jumlah Jam Kerja seluruhnya dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	655	455	1.110
1 - 14	1.072	2.749	3.821
15 - 24	1.252	2.406	3.658
25 – 34	2.316	2.382	4.698
35 – 40	5.552	3.549	9.101
41 +	27.322	14.295	41.617
Jumlah	38.169	25.836	64.005

Sumber: Sakernas BPS Kota Bukittinggi 2023.

Pada table 7.3 diatas terlihat bahwa jam kerja seminggu yang banyak adalah pada 41 jam lebih dalam seminggu atau sekitar 6 jam sehari, hal ini dimungkinkan oleh pekerja kantor atau pegawai baik negeri ataupun swasta, serta para pedagang.

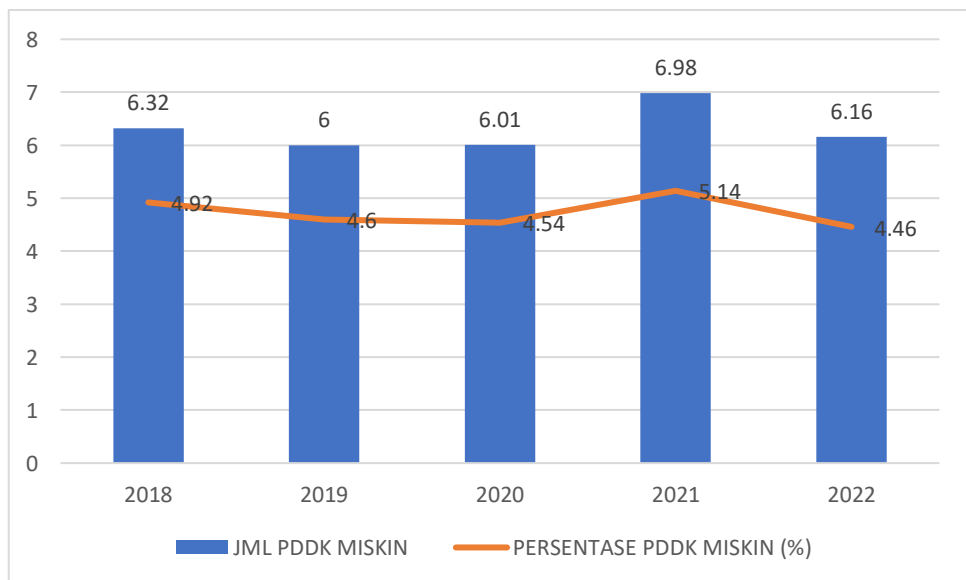
E. KEMISKINAN

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Pada tahun 2021 Garis Kemiskinan berada pada lima ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua rupiah perkapita perbulan (Rp. 570.032,-). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan maka dianggap sebagai penduduk miskin.

Pada tahun 2022 terdapat 6.160 jiwa penduduk miskin. Sedangkan saat tahun 2021 terdapat 6.980 jiwa penduduk miskin. Pada tahun 2022 terdapat 4,46 % penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang berjumlah 5,14 %.(Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Gambar 7.1. Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2017-2022



Sumber :bps.go.id

Menurunnya persentase penduduk miskin dan berkurangnya penduduk miskin sebesar 820 jiwa pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa pengurangan (migrasi) penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja jumlahnya sedikit dibanding orang yang tidak bekerja. Penurunan penduduk miskin mengindikasikan kembali pulihnya perekonomian akibat imbas dari dampak Covid 19.i. Namun untuk mempertahankan angka kemiskinan tetap kecil di Kota Bukittinggi, pemerintah perlu meningkatkan atau memperketat aturan program kemiskinan untuk tahun selanjutnya.

Apabila dikaitkan dengan Garis Kemiskinan (GK), semakin tinggi garis kemiskinan juga menjadi faktor pendorong semakin bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu, cara agar jumlah dan persentase penduduk miskin bisa ditekan/dikendalikan adalah dengan mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat pada satu sisi dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat pada sisi lainnya.

F. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 7.3. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.	1707	579	2286
2	Pertambangan dan penggalian	237		237
3	Industri/ pengolahan.	4910	4923	9833
4	Listrik, Gas dan air	660		660

5	Bangunan	2469		2469
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	15.842	11.580	27422
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	5241	528	5769
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan	1122	627	1749
9	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan.	5981	7599	13580
Jumlah		38169	25836	64005

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.

Selama ratusan tahun, pasar selalu didominasi oleh perempuan, baik yang bertindak sebagai pedagang maupun sebagai pembeli. Hal ini berkaitan dengan stereotipe perempuan yang bertugas mengurus keperluan domestik rumah tangga. Sebagai pengurus rumah tangga, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi tugas perempuan, termasuk berbelanja kebutuhan. Perempuan juga dipandang lebih telaten dalam menawar harga yang jamak terjadi, khususnya di pasar tradisional. Sementara itu, pedagang identik dengan perempuan, menurut Muwazah (2017: 108), karena berjualan di pasar, tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi, khususnya pasar tradisional. Keahlian yang diperlukan adalah keuletan, kehalusan, dan ketelitian yang semua itu merupakan stereotipe perempuan. Stereotipe perempuan yang lebih ulet, halus, dan teliti dalam berdagang tersebut nampaknya juga berlaku di pasar-pasar yang ada di Kota Bukittinggi

Banyak Perempuan yang tertarik dalam usaha perdagangan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena ekonomi atau karena

penghasilan yang diperoleh suami relatif kurang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Perempuan kemudian terdorong untuk ambil bagian dalam mencari nafkah dengan cara berdagang, meski dengan modal terbatas atau nyaris tanpa modal sama sekali. Alasan kedua adalah daya tarik sektor perdagangan. Seperti sektor perdagangan informal, sektor perdagangan memiliki kapabilitas yang besar serta lentur dalam menyerap tenaga kerja. Oleh sebab itu, sektor ini mudah dimasuki oleh siapa pun, meski tidak memiliki keterampilan yang cukup dan pendidikan yang tinggi. Alasan ketiga berkaitan dengan risiko usaha. Berdagang tidak bergantung pada perubahan musim yang kadang tidak pasti, serta gangguan lain, seperti bidang pertanian.

Berdagang di pasar, terutama di pasar tradisional, memiliki risiko yang relatif kecil karena pada pedagang skala kecil, modal yang dibutuhkan pun relatif tidak besar.

Alasan lain berkaitan dengan tekanan struktural yang berasal dari lingkungannya. Tekanan struktural ini adalah tidak memiliki lahan pertanian, semakin menyempitnya lahan pertanian, dan semakin terbatasnya kesempatan kerja untuk perempuan di pertanian karena perkembangan mekanisasi pertanian. Hal tersebut yang mendorong perempuan untuk masuk ke sektor perdagangan. Hal lain yang jadi alasan adalah pertimbangan pribadi perempuan itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan *bargaining position*, baik dihadapan suami, anak-anaknya maupun sesama perempuan. Dengan bekerja di sektor publik dan memperoleh penghasilan sendiri, perempuan akan merasa lebih dihargai

G. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri.

Tabel 7.4. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2022

No.	Kec	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	ABTB	13	0	1505	1.518
2.	GP	28	0	2406	2.434
3.	MKS	9	0	3512	3.521
Jumlah		50	0	7423	7.473

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Tabel 7.4. di atas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro. Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 7.5. berikut

Tabel 7.5. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No.	Kecamatan			
		L	P	L + P
1	ABTB	547	934	1481
2	GP	887	1968	2855
3	MKS	1064	2068	3137
Jumlah		2503	4970	7473

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha kecil lebih banyak dikelola oleh laki-laki dibandingkan dengan tenaga perempuan, sedangkan untuk usaha menengah dan usaha mikro lebih banyak berperan perempuan dari pada laki-laki.

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

H. Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Untuk menunjang produktivitas kerja, dibutuhkan *training* atau program pelatihan kerja sesuai kebutuhan. Di Kota Bukittinggi, pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat guna menambah keterampilan sehingga bisa meningkatkan usaha dan income keluarga.

Tabel .7.6 PELATIHAN PRODUKTIVITAS TAHUN 2022

NO.	NAMA PELATIHAN	BULAN	PESERTA PEREMPUAN	PESERTA LAKI-LAKI	SKPD
1	Pelatihan Kewirausahaan	Maret 2022	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & NAKER
2	Pelatihan Kuliner	November	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & NAKER
3	Pelatihan Menjahit	November	20 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & NAKER
4	Pelatihan Tata Boga	November	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & NAKER
5	Pelatihan Perbengkelan	November s/d Desember	-	16 orang	Dinas Koperasi, UKM & NAKER
6	Pelatihan Kuliner	September	25 orang	-	DP3APPKB

7	Pelatihan Batik	Oktober	12 orang	8 orang	DPMPTSP
8	Pelatihan Menyulam	Juni	15 orang		DPMPTSP
9	Pelatihan Pemasaran On Line produk khas daerah untuk peserta UPPKS kecamatan Guguk panjang		70 orang		DP3APPKB
10	Fasilitasi Kelompok UPPKS dengan sumber modal		70 orang		DP3APPKB
11	Pelatihan Manajemen Usaha bagi kelompok UPPKS Kec. G.Panjang		70 orang		DP3APPKB
12	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Pemahaman Perlengkapan Produksi		70 orang		DP3APPKB
13	Pelatihan Penguatan Ekonomi Kelompok UPPKS Kec. MKS		70 orang		DP3APPKB
	JUMLAH		470 orang	24 orang	

I. Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Tabel 7.7. .Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jml Koperasi			Anggota		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	L	P	L + P
1	MKS	12	4	16	817	890	1.707
2	ABTB	19	7	26	2.360	1.930	4.290
3	GP	41	12	53	4.362	4.742	9.104
Jumlah		72	23	95	7.539	7.562	15.101

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi cukup tinggi, ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 95 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.8. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kec	Aktif	Tdk Aktif	Jml Kop	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	12	4	16	1	0	1	20	11	31
2	ABTB	19	7	26	0	1	1	22	43	65
3	GP	41	12	53				26	67	93
Jumlah		72	5	23	1	1	2	68	121	189

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Data di atas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya.

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 7.9. Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	23	14	37
2	Bank Nagari	68	52	120
3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	6	18
6	Kemenag	61	51	112
7	BPS	7	17	24
8	PDAM		18	
9	Bulog		7	
10	Pengadilan Agama	20	14	34
Jumlah		333	305	638

Sumber: Instansi Vertikal/Lembaga Tahun 2022.

Tabel 7.10. Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2022 di Kota Bukittinggi.

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR / DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P
1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD. NATSIR	1		4	11	4	2
4	FAK. HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5

5	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
6	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5
7	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
8	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
9	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
10	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
11	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
12	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
13	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11
14	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4
JUMLAH		11	32	90	233	94	97

Tabel 7.11. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	117	90	207
2	Dokter umum	39	110	149
3.	Dokter gigi	4	29	33
4.	Bidan	0	263	263
5.	Perawat	138	747	885
6.	Perawat gigi	7	38	45
7.	Tenaga Teknis kefarmasian	9	155	174
8.	Apoteker	6	44	50
9.	Kesehatan Masyarakat	9	34	43
10.	Kesehatan Lingkungan	10	15	25
11.	Nutrisionis	6	53	59
12.	Dietision	0	5	5
13.	Keterapian Fisik	14	19	33
14.	Keteknisian Medis	55	183	238
15.	Tenaga Kesehatan Lain	11	99	110
JUMLAH		443	1.819	2.262



BAB VIII

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahir gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah

perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 8.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	GERINDRA	5	0	5
2	PKS	5	0	5
3	DEMOKRAT	4	0	4
4	GOLKAR	3	0	3
5	PAN	1	2	3
6	PPP	2	0	2
7	NASDEM	2	0	2
8	PKB	1	0	1
TOTAL		23	2	25

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD. Dengan demikian perempuan yang benar-benar dapat menjadi penyalur aspirasi perempuan di parlemen masih sangat rendah. Hal ini menguatkan analisis yang ditulis dalam laman news detik bahwa komitmen institusi politik, termasuk partai politik, terhadap upaya pemberdayaan perempuan yang belum kuat. Pelibatan perempuan dalam jumlah banyak hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30%, tanpa benar-benar memperhatikan persentase peluang keterpilihannya. Artinya, sosok-sosok perempuan yang diajukan partai sebagai calon anggota legislatif sebagian besar bukanlah sosok-sosok yang cukup dikenal oleh masyarakat, baik dari sisi figur calon, kinerja dan prestasinya. Hal ini masih ditambah dengan sebagian besar masyarakat sendiri, karena paradigma patriarki, yang cenderung *under-estimate* terhadap kemampuan perempuan bila terpilih sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, prioritas pilihan masih lebih

kepada calon laki-laki.

Keberadaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	7	1	8
2	II	7	0	7
3	III	6	1	7
4	Pada masing-masing komisi, pimpinan DPRD (Ketua dan wakil ketua sbg Koordinator	3	0	3
	TOTAL	23	2	25

Sumber: Setwan Kota Bukittinggi Tahun 2023

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 11 Tahun 2017 berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. PP ini bertujuan untuk mengelola pegawai negeri sipil (PNS) untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2457 orang PNS yang akan melayani 122.311 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2457 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.601 perempuan atau 65,16 % dan 856 orang laki-laki atau 34,84 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 sampai Doktor (69.35 %). Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	48		48
2	SMP/ SLTP	24	2	26
3	SMA / SLTA	210	91	301
4	D I/ DII	8	19	27
5	D III	59	292	351
6	S1 sampai Doktor	507	1197	1704
TOTAL		856	1601	2457

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa PNS yang berpendidikan tinggi S1 sampai dengan bergelar Doktor lebih cenderung diduduki oleh wanita, sedangkan untuk pendidikan Sekolah Dasar sampai SLTA lebih cenderung diduduki oleh PNS laki-laki.

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.4. Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	Pegawai Negeri Sipil			
1	I	52	2	54
2	II	183	162	345
3	III	488	1098	1586
4	IV	128	314	442
JUMLAH		851	1576	2427
B	PPPK			
1	V	2		2
2	IX	3	25	28
JUMLAH		5	25	30
JUMLAH / TOTAL		856	1601	2457

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2023

2. Perempuan Menduduki Jabatan

Pada tahun 2022 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 374 orang. Dari jumlah tersebut hanya 6 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 18 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.5. Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	JENIS PNS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jabatan Fungsional Tertentu	223	902	1125
	Jabfung Guru	104	518	622
	Jabfung Medis	15	211	226
	Jabfung Teknis	104	173	277
2	Fungsional Umum	454	504	958
3	Struktural	179	195	374
	Esselon V	-	-	-
	Esselon IV	106	141	247
	Esselon III	55	48	103
	Esselon II	18	6	24
TOTAL		856	1601	2457

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2023

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6. di bawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel 8.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
-----	-----------	-----------	-----------	--------

1	ASN STRUKTURAL	179	195	374
2	ASN PELAKSANA	454	504	958
3	ASN FUNGSIONAL	223	902	1125
Total		856	1601	2457

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2023

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut camatnya 2 kecamatan adalah laki-laki dan 1 kecamatan lagi adalah perempuan.

Pada tingkat kecamatan, masyarakat baru pertama kali memiliki camat perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kecamatan itu perempuan selalu lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki.

Tabel 8.7. Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	Guguk Panjang	1	0	1
2	Mandiangin Koto Selayan	1	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	1	1
JUMLAH		2	1	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2023

5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai tahun 2022 hanya 2 lurah yang perempuan. Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kota Bukittinggi masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 96 % atau 23 orang..Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8. Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Guguk Panjang	6	1	7
2	Mandiingin Koto Selayan	9	0	9
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	0	8
	JUMLAH	23	1	24

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

2.

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 8.9 berikut:

Tabel 8.9. Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2022.

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Lk	Pr
1.	Jaksa	10	7
2.	Tata Usaha	10	17
	JUMLAH	20	24

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jaksa perempuan sudah hampir mendapatkan posisi yang sama dengan laki -laki.

3. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.10. Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	KETUA	1	0	1
2	WAKIL KETUA	1	0	1
3	HAKIM	2	2	4
4	PANITERA	1	0	1
5	SEKRETARIS	0	1	1
6	WAKIL PANITERA	1	0	1
7	PANITERA MUDA	2	1	3
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	3
9	PANITERA PENGGANTI	3	5	8
10	JURU SITA	1	1	2
11	JURU SITA PENGGANTI	1	2	3

12	STAF	1	1	2
	JUMLAH	16	14	30

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tabel 8.10. di atas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi jumlah laki-laki dan perempuan sama.

4. POLRI Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.11. Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1		1
2	Komisaris Polisi	4		4
3	Ajun Komisaris Polisi	13		13
4	Inspektur Satu Polisi	25	3	28
5	Inspektur dua Polisi	60	4	64
6	AIPTU	64	1	65
7	AIPDA	88	5	93
8	BRIPKA	94	10	104
9	BRIGADIR	58	2	60
10	BRIPTU	22	10	32
11	BRIPDA	20	2	22
	JUMLAH	449	37	486

Sumber: Sumda Polresta Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena pengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 8.12. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2022

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Dharmawanita	Ny. Eva Martias Wanto	Jl. Sudirman No 27-29
2	Adhyaksa Dharmakarini	Ny. Novia Sukardi	Kantor Kejaksaan
3	Dharmayukti Karini.	Ny. Tuti Sofyan	Kantor Pengadilan Negeri
4	Bhayangkari	Ny. Ama Dody	Polres Kota Bukittinggi
5	Persit Chandra Kirana	Ny. Hizrah Brozti Dadi	Kodim 0304

6	Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Emmalinda Chaidir	Jl. Sudirman Birugo.
7	Perwira	Tuti Suryani Sofyan,SH	Jl.Guru Hamzah No 1 Tarok Dipo
8	Forum Bundo Kota Bukittinggi.	Ny. Elfianis	Kel. Puhun Tembok.
9	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi.	Ny. Fiona Erman Safar.	Jl. Perwira Belakang Balok.
10	Bundo Kandung (BK)	Ny. Efni, S.Pd	Jirek, Kel. Puhun Pintu Kabun.
11	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi.	Ny. Zulzetri, M.Pd	Pulai, Kel. Pulai Anak Air.
12	Pusat Kajian Wanita (PKW) Kota Bukittinggi.	DR. Silvia Hanani	IAIN Kubang Putih.
13	Ikatan Istri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi.	Ny.Yanti Tasman	Bank Nagari
14	Ikatan Istri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Hari Prasetyo	BRI Cabang Bukittinggi
15	Ikatan Istri Dokter Indonesia (IID) Kota Bukittinggi.	Lelliwati	Gurun Aur 248 Kubang Putih.
16	Perempuan Wanita Islam	Dr.Rahmi Yetti,SpA	Jl.Pemuda No 06
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bukittinggi		Tengah Jua
18	Salimah	Selvika Wijaya,SE	Jl. Haji Miskin
19	Aisyiah	Hj.Ermiati	Jl.Perintis Kemerdekaan No 28
20	Badan Penyantun Yarsi Sumbar	Dr.Hj.Rahmi Yetti, SpA	RSI Ibnu Sina Bukittinggi

	perwakilan Bukittinggi		
21	IWAPI	Hj.Arifah Inas	Jl.Perwira No 1
22	Muslimah NU	Misra Elvi	
23	WHBT	Lana Stiawati, SE,MBA	Jl.Jenderal A Yani
24	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK)	Ny. Fiona Agyta Erman Safar	Jl. Perwira Belakang Balok.
25	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bukittinggi.	Ny. Eva Karmila Marvendi	Jl. Perwira Belakang Balok.
26	Forum Bundo		Jl. Perwira Belakang balok
27.	Satgas PPPA		Jl. Perwira Belakang balok
28	Forum Anak	Habib Pramadhani	Jl. Perwira Belakang balok
29	Perlindungan Anak Teerpadu Berbasis masyarakat (PATBM)	Asatri	Jl. Perwira Belakang balok

2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 8.13. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Parpol	No. SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	PPP	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64

3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012, 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP- NASDEM/XI/2013	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/ III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2 012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/ HANURA/VIII/2016, 19 Agustus 2016	13	9	22
8	PKS	074/D/SKEP/AC00- PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
Jumlah			199	117	316

3. Kaukus Perempuan Politik

SK. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan Nomor SK. Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018-2022.



BAB IX

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Semua orang sama didepan hukum dan hukum harus ditaati bukan untuk dilanggar. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap deskriminasi, dan bahkan terhadap deskriminasi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

A. Kasus Kriminalitas yang ditangani

Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

Tabel 9.1. Jumlah Kriminal menurut Jenis Kejadian di Kota Bukittinggi, 2022

No	Kasus	Diterima	Diputuskan
1.	Penganiayaan berat	21	19
2.	Penganiayaan Ringan	3	1
3	Cabul	24	18
4.	Perkosaan	1	1
5.	Perzinaan	1	1
6.	Pencurian dengan kekerasan	2	1
7.	Pencurian dengan pemberatan	32	53
8.	Pencurian biasa	13	39
9.	Curanmor	2	39
10.	Penggelapan	15	9
11	Penipuan	13	6
12	Perjudian	7	6
13	KDRT	9	-
14	Perampasan Hak	-	2
15	Kekerasan terhadap anak	2	2
16	Curi dalam keluarga	2	1
17	Perdagangan orang	1	
18	Penelantaran keluarga		1
19	Membawa perempuan belum dewasa	1	
20	Percobaan pencurian		1
	JUMLAH	149	209

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi

1. Anak Terlantar

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No. 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Jumlah Anak terlantar di Kota Bukittinggi sejak tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, akan tetapi masih dibawah angka tahun 2020 sebagaimana terlihat pada gambar berikut .

Gambar 9.1. Jumlah Anak Terlantar Tahun 2018 sd 2022 di Kota Bukittinggi



Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2023.

2. Anak yang ditampung di Panti Asuhan

Tabel 9.2. Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, sampai dengan 2022

No	Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bukittinggi	94	94	96	96	107	75

Sumber : Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2023

3. Bekas Warga Binaan lembaga pemasyarakatan

Tabel 9.3. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017s/d 2022

No	Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bukittinggi	15	-	2	0	7	7

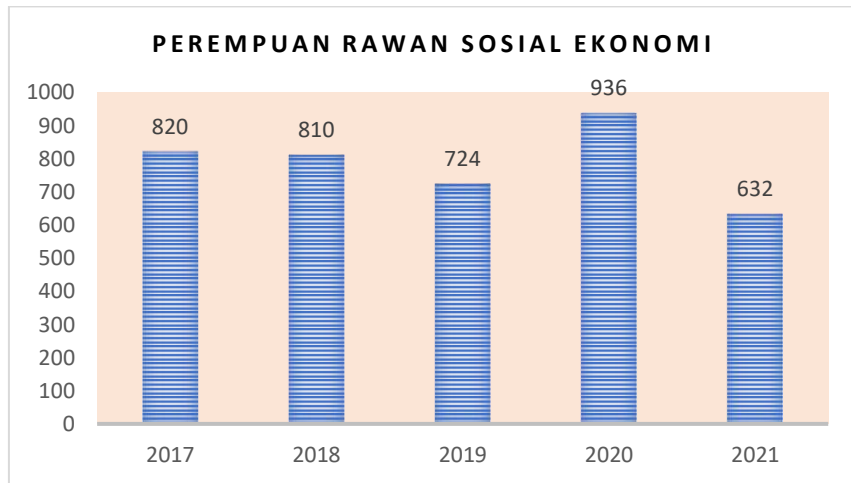
Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas, jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) tahun 2020 tidak ada.

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun tetapi sudah menikah atau janda, atau berusia kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Gambar 9.2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2021



Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan jumlah wanita rawan sosial ekonomi sampai dengan tahun 2019, akan tetapi disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, maka terjadi peningkatan di tahun 2020.

5. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, *cerebral palsy* (CP).
- Disabilitas intelektual: *Down syndrome*, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Pengertian disabilitas ini memang cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Tabel 9.4 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	ndang Disabilitas
1	Guguk Panjang	23
2	Mandiingin Koto Selayan	38
3	Aur Birugo Tigo Baleh	37
Total		98

Sumber: Bukittinggi dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penyandang disabilitas Di Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebanyak 98 orang yang masih tergolong anak-anak.

6. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tabel 9.5. Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Pekerja Sosial	Karang Taruna	Tenaga Kerja Sosial	Organisasi Sosial
1	Guguk Panjang	37	27	1	10
2	Mandiingin Koto Selayan	54	28	1	5
3	Aur Birugo Tigo Baleh	31	28	1	3
JUMLAH		112	83	3	18

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2022

7. Kumpulan Peraturan Dan Kebijakan Kota Bukittinggi Yang Responsif Gender

Dalam bidang hukum, Peraturan dan Kebijakan Kota Bukittinggi yang responsive Gender tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9.6 Daftar Perda / Perwako Kota Bukittinggi yang Mendukung Perempuan dan Anak Tahun 2020 s/d 2022

No Urut	NOMOR	TANGGAL	NAMA PERDA
PERATURAN DAERAH			
1.	Perda No 14	30 Mai 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Perda No 9	23 Des 2021	Penyelenggaraan rumah Susun
3	Perda No 12	30 Des 2021	APBD Th 2022
4	Perda No 1	27 Juli 2022	Pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan
5	Perda No 3	10 Okt 2022	Pengelolaan Pasar Rakyat
6	Perda No. 6	28 Okt 2022	Tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda
7	Perda No. 8	29 Des 2022	APBD Tahun 2023
PERATURAN WALIKOTA			
1	Perwako No. 2	2 Februari 2021	Pola Tata Kelola RSUD Kota Bukittinggi
2	Perwako No. 3	2 Februari 2021	SDM RSUD Kota Bukittinggi
3	Perwako No. 11	22 April 2021	Pedoman dan Prosedur pemberian hibah dan Bansos
4	Perwako No. 13	23 April 2021	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD dan SMP
5	Perwako No. 22	5 Juli 2021	Penerapan SPM
6	Perwako No. 37	30 November 2021	SPM Pendidikan Anak Usia Dinin 1(Satu) tahun Pra Sekolah Dasar

7	Perwako No. 55	31 Desember 2021	Kedudukan (Susunan Organisasi) Tentang Fungsi Serta Tata Kerja Dinas P3APKB
8	Perwako No. 2	2 Februari 2022	Sistem Online Pajak Daerah
9	Perwako No. 3	15 Februari 2022	Tatacara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan Penanggungjawab dan Pelaporan Serta Monev Belanja Bantuan Keluarga
10	Perwako No. 4	18 Februari 2022	Perubahan Atas Perwako No 38 Tahun 2022 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Polres Sebagai Upaya dan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019
11	Perwako No. 12	22 Juni 2022	Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik Secara Elektronik

8. Perkawinan dan Perceraian

Persoalan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Perubahan utama dalam UUNo 16 Tahun 2019 dari UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 7. Dalam pasal tersebut, sebelumnya tertulis bahwa syarat pria boleh menikah adalah minimal berusia 19 tahun, sedangkan syarat wanita boleh menikah adalah berusia 16 tahun. Namun jika pasangan menikah kurang dari umur 19 tahun, seperti dimaksud dalam UU tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Orangtua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan memberikan alasan serta bukti pendukung yang kuat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 UU tersebut (dispensasi ini juga berlaku pada UU sebelumnya).

"Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".

Keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut menyatakan bahwa

perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan tersebut mengatur agar tidak terjadi perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain pertimbangan perlindungan terhadap anak dari sisi usia, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin ini juga diharapkan bisa menurunkan laju kelahiran dan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak juga dapat terpenuhi, sehingga tumbuh kembang anak optimal, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Tabel. 9.7 Jumlah Peristiwa Nikah di Kota Bukittinggi tahun 2022

No	Kecamatan	Pernikahan
1	Guguk Panjang	263
2	Mandiingin Koto Selayan	582
3	Aur Birugo Tigo Baleh	177
	Bukittinggi	1022

Sumber : Kementerian Agama Kota Bukittinggi/

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Bukittinggi, masih terdapat perkawinan anak, meskipun datanya sudah semakin berkurang. Pada 2022, masih terdapat perkawinan anak yang menikah di bawah usia

19 tahun yang mendapat dispensasi / Pengadilan Agama., dibuktikan dengan adanya dispensasi kawin yang masuk tahun 2022 sebanyak 29 kasus dan 25 kasus sudah mendapat keputusan.

Berdasarkan data dari pengadilan Agama ,Perceraian yang di laksanakan melalui Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Cerai Talak ; masuk 216 dan diputuskan 176
- Cerai Gugat : masuk 552 dan diputuskan 463

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang sah.

BAB X

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 14 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Peraturan presiden republic Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan , bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hokum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel. 10.1 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelompok Umur			TOTAL
		0-<18	18->25	>25	
1	Guguk Panjang	2	1	4	7
2	Mandiingin K.Selayan	1	1	4	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	0	3	5
	JUMLAH	5	2	11	18

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan adalah pada usia dibawah 18 tahun dan diatas 25 tahun . Bila dilihat rentang usia korban ini , maka disimpulkan korban merupakan kategori anak-anak dan kategori orang dewasa. Kasus terbanyak berada di kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi belum didapatkan data yang akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena stigma yang terjadi pada masyarakat adalah rasa malu apabila mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di rumah tangga tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat pada table 9.2 dibawah, bahwa korban juga dialami oleh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Tabel. 10.2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	G.P	0	0	2	2	5	1
2	M.K.S	0	0	2	4	4	3
3	ABTB	0	0	0	0	5	1
	JUMLAH	0	0	4	6	15	5

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Terlihat pada table diatas bahwa perempuan korban kekerasan banyak terjadi pada tingkat pendidikan SLTA, yang berarti tindak kekerasan di Kota Bukittinggi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh factor intelektual/ kebodohan, tentunya banyak factor lain yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.

Tabel 10.3. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kec.	Berusaha sendiri	Berusaha di bantu buruh tidak tetap	Buruh / Karyawan/ Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	G.P	0	0	1	0	0	0	9
2	M.K.S	1	0	5	0	0	0	7
3	ABTB	0	0	3	0	0	0	3
	JUMLAH	1	0	9	0	0	0	19

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada pelajar, ini disebabkan karena :

- anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadukan kekerasan yang di alami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
- Penyalahgunaan gadget pada anak
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah
- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 10.4. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	G.P	4	4	0	2
2	M.K.S	1	10	1	1
3	ABTB	1	4	0	1
	JUMLAH	6	18	1	4

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang belum kawin dan telah kawin. Hal ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan jenis kekerasan yang terjadi di Kota Bukittinggi lebih banyak kekerasan fisik dan kekerasan psikis, angka ini berfluktuatif dari tahun ke tahun, sedangkan kasus kekerasan lain juga banyak, dan terdapat

kemungkinan masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan. Jenis kekerasan dapat dilihat pada table 10.5 dibawah ini .

Tabel 10.5. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

No	Kecamatan	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	TPPO	PENELANTARAN	LAINNYA
1	Guguk Panjang	3	2	1	0	0	4
2	Mandiingin K.Selayan	2	5	1	0	1	4
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	2	0	0	0	1
	JUMLAH	8	9	2	0	1	9

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan adalah kekesarasan Psikis, Kekerasan psikis merupakan bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, KDRT tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya.

KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).

Tabel. 10.6. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Guguk Panjang	6	0	4
2	Mandiangan K.Selayan	11	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5	0	1
	JUMLAH	22	1	6

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga. Hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Jika kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, maka hal ini dapat diasumsikan bahwa pelaku kekerasan adalah orang terdekat, seperti suami atau anggota rumah tangga lain

Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan perempuan perlu lebih ditingkatkan agar perempuan menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Hal ini disebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan karena mereka tidak berdaya secara ekonomi, sehingga sangat tergantung pada suami. Selain itu, upaya edukasi kepada suami dan istri juga perlu lebih digencarkan, misalnya edukasipranikah maupun edukasi kepada masyarakat terkait isu kesetaraan dan keadilan gender untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

Tabel. 10.7. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Pena- nganan pengadu an	Pelayana n kesehata n	Rehabi litasi sosial	Penegak an & bantuan hukum	Pemulanga n & reintegrasi
1	G.P	10	0	0	0	0
2	M.K.S	13	0	0	0	0
3	ABTB	6	0	0	0	0
	JML	29	0	0	0	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari 29 orang yang datang ke P2TP2A , semua sudah dilaksanakan penanganan kasus.

Tabel. 10.8 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	G.P	10	0	0
2	M.K.S	13	0	0
3	ABTB	6	0	0
	JUMLAH	29	0	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, pada umumnya didominasi oleh rasa malu. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik

maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 10.9 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/ belum sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	GP	0	1	0	1	5	0
2	MKS	0	0	3	1	1	1
3	ABTB	0	0	0	0	5	0
	JUMLAH	0	1	3	2	11	1

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan dilakukan oleh orang yang juga berpendidikan, yang berarti bahwa pemicu terjadinya kekerasan adalah factor lain.

Tabel 10.10 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha a sendiri	Berusaha di bantu buruh tdk tetap	Pekerja bebas di Pertanian	Pekerja bebas di Non Per- tanian	Pekerja Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	G.P	4	1	0	0	0	2
2	M.K.S	6	3	0	1	0	7
3	ABTB	2	0	0	0	0	3
	JML	12	4	0	1	0	12

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Pelaku kekerasan yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Bukittinggi, memiliki pekerjaan berusaha sendiri, pelajar dan lain-lain.

Bila dilihat dari hubungan pelaku dan korban, maka kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dilakukan oleh suami korban yaitu 16 orang, sedangkan selebihnya dilakukan oleh keluarga, orang tua dan keluarga lainnya. Sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 10. 11. Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Hubungan dengan korban di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Hubungan Dengan Korban			
		Suami	Orang Tua	Keluarga	Keluarga lainnya
1	G.P	4	1	1	4
2	M.K.S	7	2	2	2
3	ABTB	3	1	1	1
	JUMLAH	14	4	4	7

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Upaya pemberdayaan perempuan perlu lebih digiatkan agar perempuan menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Hal ini disebabkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan karena mereka tidak berdaya secara ekonomi, sehingga sangat tergantung pada suami. Selain itu, upaya edukasi kepada suami dan istri juga perlu lebih digencarkan, misalnya edukasi pranikah maupun edukasi kepada masyarakat terkait isu kesetaraan dan keadilan gender untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga, maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal.

Tabel 10. 12 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN, DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

		JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELAN TARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	G.P	0	1	3	1	2	6	0	0	1	0	0	2
2	M.K.S	5	0	4	1	2	5	0	0	1	0	0	5
3	ABTB	0	0	3	0	3	1	0	0	0	1	0	5
JUMLAH		5	1	10	2	7	12	0	0	2	1	0	6

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, penelantaran dan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

- 1) kekerasan fisik ; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul,menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- 2) kekerasan psikologi/mental ; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.
- 3) kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
- 4) kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel. 10.13 Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2022

N O	KECA-MATAN	R P T C	L B H	P K T	P P T	U P P A	TRAUM A CENTE R	WOMAN CRISIS CENTER	SHEL TER	RUMAH SINGGAH	RPS A	PANTI ASUAHAN ANAK	P2T P2A
1	G.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2	M.K.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel.10.14 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Boleh	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB XI

INDEKS KUALITAS KELUARGA

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Adanya fakta kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dan juga anak perempuan dan anak laki-laki menunjukkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik. Berbagai macam studi menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Sejalan dengan undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan system yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan non fisik) proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan out put (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Dengan demikian keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek , yaitu :

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhiya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Pendidikan dan Kesehatan
2. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi
3. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah

non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap isteri.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan Kualitas Keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

1. IKK yang “kurang responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
2. IKK yang “cukup responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai antara 50-75;
3. IKK yang “responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai di atas 75.

IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu:

1. dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator;
2. dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator;
3. dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator;
4. dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator;
5. dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator

Berikut adalah hasil survey IKK yang dilaksanakan di Bukittinggi Tahun 2021 yang diberikan questioner kepada peserta sekolah keluarga, yang tersebar di 24 kelurahan yang ada di Bukittinggi. dengan jumlah 648 sampel

Dari hasil oleh data diperoleh hasil IKK sebesar **74,35** yang termasuk kategori **Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi**.

Adapun uraian dari hasil survey tersebut adalah :

DIMENSI 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi 1 terdiri atas 3 indikator yakni : landasan legalitas, keutuhan keluarga dan Kemitraan Gender.

Adapun hasil dari pengolahan data diperoleh sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil? (legalitas perkawinan)	631	97,38
2	Apakah semua anak memiliki akte kelahiran? (legalitas kelahiran)	629	97,07
3	Apakah semua anggota keluarga (suami isteri dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah?, suami tidak pisah ranjang, boleh pisah sementara apabila suami/ istri bekerja diluar rumah (keutuhan keluarga)	519	80,09
4	Adakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak (minimal 2 jam perhari)? (kebersamaan dlm keluarga)	430	66,36
5	Adakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak? (kebersamaan dlm keluarga)	430	66,36
6	Apakah Suami isteri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga? (keterbukaan pengelolaan keuangan)	564	87,04
7	Apakah Suami isteri merencanakan bersama-sama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai? (pengambilan keputusan keluarga)	533	82,25
8	Apakah istri bekerja? (kemitraan suami-istri)	175	27,01

9 Apakah ayah dan atau ibu bekerjasama dalam 506 78,09
mendampingi anak menyelesaikan tugas sekolah
saat kondisi Covid-19? (kemitraan suami-istri)

Berdasarkan table Dimensi 1 terlihat bahwa yang belum memiliki legalitas perkawinan dan legalitas anak masing-masing sebanyak 3 %.

Pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan sosial pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu. Tanpa ada surat/akta nikah maka akan memperlemah posisi perempuan dan anakanak secara hukum

Akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran yaitu pengakuan formal seorang anak dalam hukum sehingga mengamankan Hak Anak misalnya identifikasi anak. Akta kelahiran berfungsi sebagai kebutuhan dasar untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, membuat Kartu Tanda Penduduk, melamar pekerjaan, urusan terkait pemilikan tanah, dan pencatatan perkawinan. Tanpa ada akta kelahiran maka akan memperlemah posisi anak secara hukum.

Langkah yang diperlukan adalah dengan melaksanakan Sidang Istbath nikah bagi pasangan yang telah memenuhi persyaratan dan perkawinan sah menurut agama, serta pengesahan asal usul anak yang disidangkan oleh Pengadilan Agama.

Hasil survey IKK ini juga memperlihatkan bahwa hanya 66,36% dari ayah ataupun ibu yang menyisihkan waktu khusus untuk anaknya. Ketersediaan waktu orang tua serta komunikasi terhadap anak sangat besar pengaruhnya untuk pemebentukan karakter anak. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang profesor psikologi dari Sam Houston State University,

Rowland S. Miller, yang di dalam bukunya menegaskan bahwa komunikasi yang dipupuk oleh keluarga secara rutin akan menghasilkan kedekatan emosional yang semakin dalam.

Dari survey IKK yang dilaksanakan pada tahun 2021, terlihat bahwa untuk indikator kemitraan keluarga, keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga sudah dilaksanakan oleh 87 %. Angka ini menggambarkan bahwa kemitraan gender sudah terlaksana dengan kategori baik.

DIMENSI 2: Ketahanan Fisik

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, tempe, tahu, buah) dua kali per hari?	275	42,44
2	Apakah Ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet) ?	613	94,60
3	Apakah Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/ kronis (kencing manis, darah tinggi, jantung , stroke, ginjal, lumpuh, paru-paru, asma, radang otak, kaki gajah, types, DBD, Diare) atau cacat bawaan?	524	80,86
4	Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak? Ruang tidur terpisah berarti dipisahkan oleh dinding permanen atau sekat darurat/sementara.	580	89,51

Untuk dimensi ketahanan fisik terlihat bahwa indicator-indikatornya sudah masuk kategori tinggi, kecuali mengkonsumsi makanan lengkap minimal 2 kali sehari. Hal ini disebabkan pola kebiasaan makan masyarakat yang lebih cenderung untuk tidak memakai pola makan lengkap (nasi, sayur, tempe, tahu, buah) setiap hari minimal 2 kali.

Untuk meningkatkan konsumsi menu lengkap, maka pola kebiasaan masyarakat hendaklah perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar supaya lebih mengutamakan makanan yang bervariasi beraneka ragam dan sehat, terutama lebih meningkatkan konsumsi buah dan sayuran.

Frekuensi makan yang baik yaitu 3 (tiga) kali dalam sehari dan lengkap zat gizinya, apabila tidak tercapai maka akan terjadi kekurangan zat gizi terutama anak-anak. Tanpa makan lengkap 2 (dua) kali per hari maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan

Penyakit yang dialami anggota Keluarga dan disabilitas menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia

DIMENSI 3: Ketahanan Ekonomi

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah Keluarga memiliki rumah? Memiliki rumah berarti milik sendiri, meskipun tidak harus dengan sertifikat	337	52,01
2	Apakah Suami/isteri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp. 455.000 per orang per bulan?	341	52,62
3	Apakah Keluarga pernah menunggak membayar listrik?	491	75,77

4	Apakah Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak? artinya pernah kesulitan memenuhi keperluan pendidikan (seperti ongkos, jajan, baju sekolah, dll)	367	56,64
5	Apakah ada anak yang putus sekolah?	600	92,59
6	Apakah Suami dan/atau isteri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp 2.100.000 ?	196	30,25
7	Adakah Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang?	552	85,19

Jika dilihat dari dimensi Ketahanan Ekonomi, ternyata hampir sebagian dari responden belum memiliki rumah, sedangkan memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar Keluarga sehingga merupakan simbol keamanan Keluarga. Tanpa memiliki rumah, anggota Keluarga menjadi berpindah-pindah dan rentan terhadap keutuhan Keluarga.

Penghasilan merupakan salah satu persyaratan utama dalam Keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan Keluarga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Keluarga. Tanpa memiliki penghasilan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.

Dari keluarga yang menjadi responden ternyata pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak. Menunggak iuran pendidikan akan mengganggu kelancaran urusan pendidikan anak, membuat anak kurang kepercayaan diri, kurang semangat sekolah sehingga dapat menurunkan nilai akademis anak di sekolah

Istri bekerja mencerminkan posisi perempuan dalam Keluarga karena mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi Keluarga. Hal ini menandakan adanya Kesetaraan Gender dalam kontribusi ekonomi dalam Keluarga. Istri yang tidak bekerja menandakan kerentanan perempuan dalam kontribusi menghasilkan pendapatan dalam Keluarga.

DIMENSI 4: Ketahanan Sosial Psikologi

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Adakah terjadi kekerasan antar suami dan isteri ? (saling berteriak menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan/ mempermalukan, memukul/ mendiamkan lebih dari 3 hari pasangan satu sama lain, pisah ranjang)	413	63,73
2	Adakah terjadi kekerasan antar orang tua dan anak?	540	83,33
3	Adakah anggota keluarga yang terlibat masalah (spt: mencuri, tauran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dll)	618	95,37
4	Apakah rekreasi diputuskan bersama oleh suami-istri dan anak (jika ada)?	268	41,36

Dari table diatas terlihat, bahwa terjadi kekerasan antar suami dan isteri (saling berteriak menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan/ mempermalukan, memukul/ mendiamkan lebih dari 3 hari pasangannya). 63,73 % responden.

Kekerasan antar suami dan istri dapat memicu perceraian dan trauma bagi seluruh anggota Keluarga. Adanya kekerasan antar suami dan istri maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.

Untuk indikator pelaksanaan rekreasi terlihat hanya 41,36 % yang melaksanakan rekreasi. Rekreasi bersama Keluarga berdampak pada peningkatan interaksi, ikatan, keeratan (bonding), dan komunikasi anggota Keluarga serta penyegaran jasmani dan rohani seluruh Keluarga. Tanpa rekreasi bersama, maka Keluarga cenderung stres, dan rentan dari sisi sosial psikologi.

DIMENSI 5: Ketahanan Sosial Budaya

No	Pertanyaan	Jawaban	%
1	Apakah anggota keluarga memberikan perhatian dan merawat orang tua lanjut usia diatas 60 tahun?	403	62,19
2	Apakah Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerja bakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan?	350	54,01
3	Apakah Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?	340	52,47
4	Apakah keluarga memiliki akses informasi dari media cetak, media elektronik, atau media online?	520	80,25

Perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun merupakan akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia. Tanpa merawat orang tua lanjut usia maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya. Pada lanjut usia perempuan, mereka menjadi kelompok yang berpotensi tinggi mangalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Keluarga sangat berperan dalam melindungi lanjut usia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk.

Ibadah mempengaruhi positif terhadap kesehatan mental individu dan psikis/mental Keluarga dan masyarakat. Tanpa kegiatan agama dikhawatirkan kesehatan mental individu dan Keluarga menjadi rentan dari dimensi sosial psikologi dan sosial budaya serta tidak mampu berperilaku sosial yang positif.

Keluarga generasi milenial menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari. Anak yang tidak didampingi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online dikhawatirkan menjadi kecanduan media sosial, bermain game online, dan membuka situs pornografi. Mendampingi anak dalam menggunakan media sosial online merupakan bentuk perlindungan Hak Anak atas aspek sosial psikologi dan sosial budaya.

BAB XII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsive gender.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

2. Konstruksi Gender

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah 99,36, angka ini lebih tinggi dari pada IPG Propinsi Sumatera Barat yaitu 94,72 , yang berarti Pembangunan Manusia menurut gender telah terlaksana dengan baik.

- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi masih tergolong rendah yaitu 63,37, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu 60,19 hal ini disebabkan makin meningkatnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi,
- c. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2022 sebesar 59,78 persen, angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 (66,17), ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial.
- d. Keterlibatan Perempuan di Parlemen adalah sebesar 8 % dan angka ini mempengaruhi terhadap pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender.

3. Kependudukan

- a. Dari proyeksi penduduk Kota Bukittinggi tahun 2022 menunjukkan bahwa ratio jumlah penduduk perempuan sama dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,14%.
- b. Angka Ketergantungan di Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebesar 46,27 , itu berarti penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) yang sering tergantung secara ekonomi.
- c. Komposisi penduduk perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.
- d. Pada tahun 2022 di Kota Bukittinggi 96,12 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.
- e. Anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akte Kelahiran adalah sebesar 98,35 % laki-laki dan 97,85% Perempuan.

- f. 3928 orang atau 15,83 % kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

4. Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Sekolah Kota Bukittinggi sudah melebihi APS Propinsi Sumatera Barat , hal ini disebabkan akses pendidikan untuk penduduk usia sekolah , sehingga kesempatan dalam mengenyam pendidikan semakin besar.
- b. Angka Partisipasi Kasar pada tingkat pendidikan SD/MI Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar 106,34. Angka ini melebihi 100 persen hal ini disebabkan adanya siswa yang belajar kurang atau melebihi dari usia sekolah SD/MI , serta adanya siswa yang berasal dari luar kota Bukittinggi.
- c. APM terendah tahun 2022 ada pada jenjang pendidikan SMA / SMK/ MA. Hal ini menggambarkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat anak yang sekolah tidak tepat waktu, terlalu cepat atau terlalu lambat masuk SMA /SMK / MA. Bila dilihat dari perspektif gender Perempuan lebih 2 point dari laki laki
- d. Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2022 adalah sebesar 99.52 % laki-laki dan 99,73 % perempuan.
- e. Rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun adalah 11,36. Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

5. Kesehatan

- e. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi mencapai 74,82 tahun. artinya bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022 memiliki kemungkinan untuk hidup hingga usia 74 atau 75 tahun. hal ini merupakan dampak

- dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- f. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2022 di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 0 Jiwa. Kasus ini menurun dibandingkan kasus tahun sebelumnya disebabkan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal,
 - g. Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah sebanyak 16 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 7 /1.000 kelahiran hidup, angka ini meningkat jauh dibanding tahun 2021 yaitu 2,3/ 1.000 kelahiran hidup, diperlukan perhatian kesehatan khusus karena tubuh bayi usia kurang dari 1 bulan sangat lemah dan rentan terkena penyakit.
 - h. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah 9,1 % sedangkan target nasional tahun 2024 adalah sebesar 14,%,
 - i. Pada tahun 2022 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 7237 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 26.270 orang.(27,55%)
 - j. Usia perkawinan pertama sebagian besar warga Bukittinggi adalah pada usia 19 tahun lebih pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun.pada laki-laki., terdapat 21,71% laki-laki menikah di usia kurang dari 25 tahun dan 4,87% perempuan yang menikah di usia muda kurang dari 19 tahun.
 - k. Perolehan penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2022 adalah kategori Madya

6. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- l. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sebanyak 64,43, tingkat partisipasi angkatan kerja laki- laki lebih

banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 79,71 % berbanding 50,32 % perempuan.

- m. Terdapat angka pengangguran terbuka sebesar 4,9 % , terlihat adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki 4,52 % dan perempuan 5,44 %.
- n. Status pekerjaan penduduk perempuan Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun keatas yang terbanyak adalah yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 45,97%.
- o. Pada tahun 2022 terdapat jumlah penduduk miskin adalah 6.160 jiwa atau 4,46 % penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan.

7. Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat
- b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

8. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Tahun 2022, terjadi penurunan jumlah wanita rawan sosial ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, maka terjadi peningkatan di tahun 2020.
- c. Jumlah penyandang disabilitas Di Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebanyak 98 orang yang masih tergolong anak-anak.

- d. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

9. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

- p. Perempuan yang mendapatkan kekerasan yang melapor dan ditangani oleh P2TP2A pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 orang , terbanyak pada usia dewasa. Disebabkan banyak factor yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.
- q. Kekerasan pada anak yang dilaporkan dan ditangani oleh P2TP2A tahun 2022 sebanyak 46 kasus, yang terdiri kekerasan terjadi secara Fisik, psikis dan seksual, penelantaran dan lainnya.
- r. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

10. Indeks Ketahanan Keluarga

Hasil pengolahan dari data survey IKK yang dilaksanakan di Bukittinggi Tahun 2021 terhadap warga Kota Bukittinggi yang tersebar di 24 kelurahan. dengan jumlah 648 sampel diperoleh hasil IKK sebesar **74,35** yang termasuk kategori **Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi**.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.

